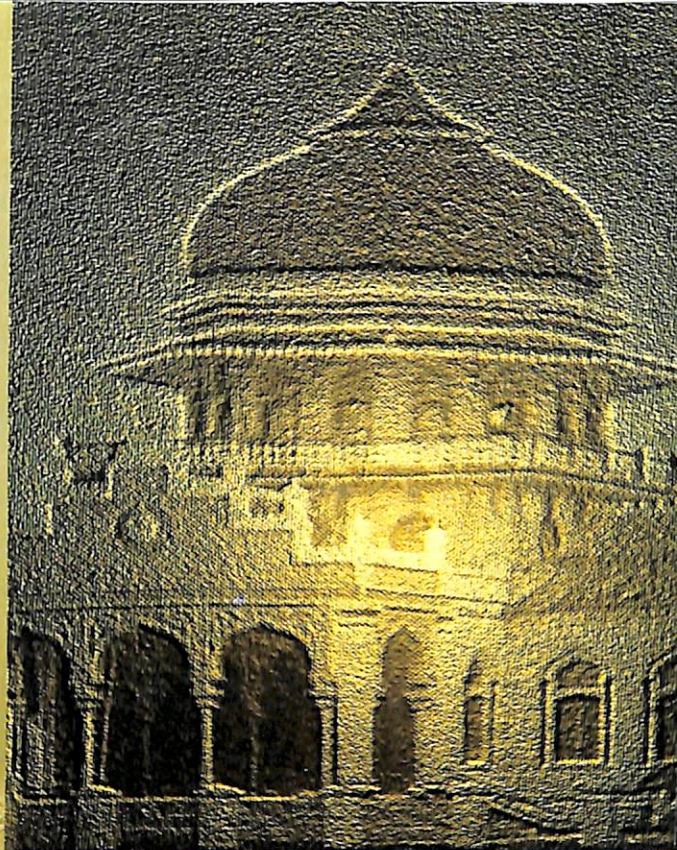




PUSA

Persatuan Ulama Seluruh Aceh

Dinamika dan Peran PUSA dalam
kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh

**DINAMIKA DAN PERAN PERSATUAN ULAMA
SELURUH ACEH (PUSA) DALAM KEHIDUPAN
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT ACEH**

Oleh:

Agus Budi Wibowo

Irini Dewi Wanti

Iskandar Eko Priyotomo

Penyunting:

Drs. Rusdi Sufi

Konsultan:

DR. Faisal A. Rani, S.H. M.H.

**BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BANDA ACEH
2005**

Hak Cipta 2005, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan foto copy, tanpa izin sah dari penerbit

Cetakan pertama, 2005

Penulis :

Agus Budi Wibowo

Irini Dewi Wanti

Iskandar Eko Priyotomo

Penyunting:

Drs. Rusdi Sufi

Konsultan:

DR. Faisal A. Rani, SH, MH

***DINAMIKA DAN PERAN PERSATUAN ULAMA SELURUH
ACEH (PUSA) DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT Aceh***

ISBN: 979-9164-52-4

Hak Penerbitan pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai
Tradisional Banda Aceh

Setting/Layout : Agus Budi Wibowo

Desain Sampul : Titit Lestari

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh
Jln. Tgk. Chik Kutakarang No. 3
Komplek Dinas Pariwisata Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Banda Aceh Telp. (0651) 7410455

PENGANTAR

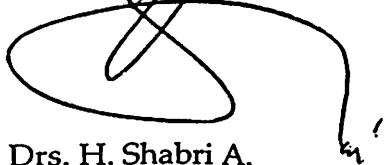
Perjuangan kemerdekaan di Indonesia dapat dikelompokkan dalam dua cara, yaitu melalui perlawanan senjata dan jalur diplomasi. Jalur diplomasi dilakukan setelah dipandang bahwa jalur senjata tidak sepenuhnya berhasil. Kemudian, setelah Belanda menerapkan politik pasifikasi banyak pemuda-pemuda Indonesia yang mengenyam dunia pendidikan dan berhasil. Merekalah yang kemudian memikirkan bagaimana memerdekakan Indonesia melalui cara selain mengangkat senjata. Dimulailah era baru perjuangan bangsa Indonesia. Tahun 1908 muncullah Boedi Oetomo dan kemudian disusul oleh Syarikat Islam sebagai wadah perjuangan dalam bentuk organisasi. Hal ini disusul lagi oleh berdirinya berbagai organisasi modern di berbagai tempat di Indonesia dengan satu tujuan memerdekakan Indonesia. Untuk itu, dipandang perlu mempersatukan organisasi-organisasi tersebut melalui Soempah Pemoeda yang dilaksanakan pada tahun 1928.

Salah satu organisasi yang tumbuh di Aceh di kala bangsa Indonesia berjuang meraih kemerdekaan adalah Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Organisasi ini dibentuk sebagai salah satu wadah ikut berperan di dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Seiring dengan berjalannya waktu organisasi ini terus berkembang. Salah seorang pakar menyebutkan bahwa PUSA merupakan organisasi khas Aceh.

Setelah selesainya penelitian yang dilanjutkan dengan penerbitan ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu. Kepada penulis,

teruslah berkarya dan menghasilkan buku-buku yang lebih berbobot di masa yang akan datang. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada DR. Faisal A. Rani, SH, MH atas waktu kepada penulis sehingga bertambah wawasan dan pengetahuan. Mohon maaf kalau buku yang sampai di tangan pembaca ada kekurangan di sana sini.

Banda Aceh, Oktober 2005
Kepala Balai Kajian Sejarah dan
Nilai Tradisional Banda Aceh



Drs. H. Shabri A.
NIP. 131412260

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	6
BAB II ACEH: DARI REVOLUSI FISIK HINGGA PERJUANGAN POLITIK.....	11
A. Perjuangan melawan kolonialis Belanda.....	11
B. Politik Pasifikasi dan Terbentuknya Masyarakat Berpendidikan.....	19
C. Dari Revolusi Fisik Hingga Perjuangan Politik	26
BAB III DINAMIKA PERSATUAN ULAMA SELURUH ACEH DARI MASA KE MASA.....	41
A. Dinamika PUSA.....	41
B. Tokoh-tokoh di Balik PUSA.....	78

BAB IV PERAN PUSA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.....	103
A. PUSA: Dalam Kontelasi Politik Lokal dan Nasional.....	103
B. PUSA: Dalam Konstelasi Sosial Budaya Masyarakat.....	120
BAB IV PENUTUP	123
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

"Saya tidak tahu pasti, mengapa tiap sarjana asing yang datang ke Kota Pelajar dan Mahasiswa Darussalam di Banda Aceh, sangat tertarik kepada suatu organisasi lokal di Aceh dahulu yang terkenal dengan nama singkatan PUSA, sedang nama lengkapnya adalah Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Yang terang ialah mereka datang kepada saya menanyakan sejarah dan perjuangan PUSA"
(A. Hasjmy)

Demikian sebuah pernyataan yang dibuat oleh Ali Hasjmy dalam bukunya yang berjudul *Ulama Aceh Mujahid dan Pembangun Tamadun Bangsa* (1997).¹ Bagi masyarakat Aceh, PUSA bukan merupakan kata asing lagi. PUSA

¹Ali Hasjmy, *Ulama Aceh Mujahid dan Pembangun Tamadun Bangsa*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

adalah sebuah organisasi masyarakat/Ulama yang muncul pada perempatan pertama abad XX.

Pada awal abad XX di daerah Aceh telah muncul sekelompok cendekiawan hasil didikan Belanda. Pendidikan Barat yang diprioritaskan Belanda kepada para anak bangsawan Aceh (*uleebalang*) tidak memberi keuntungan dalam arti yang sesungguhnya bagi pengukuhan Belanda di Aceh seperti yang mereka harapkan. Oleh karena sebagian kaum cendekiawan ini masih berani menentang pelbagai kebijaksanaan pemerintah Belanda yang dianggap merugikan rakyat Aceh.

Perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda melalui perjuangan fisik dan senjata selama bertahun-tahun tidak membawa hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, pergerakan nasional melawan Belanda berubah haluan dengan cara-cara lain, khususnya dengan organisasi kemasyarakatan dan juga politik. Derap langkah pergerakan nasional melalui organisasi ini bermula di Pulau Jawa yang dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo (1908).

Derap langkah pergerakan nasional itu terasa pula gaungnya di Aceh. Di daerah Aceh juga bermunculan organisasi-organisasi masyarakat yang dapat dikatakan modern seperti Serikat Islam (Juli 1916), Serikat Aceh Muda (Juli 1916), Serikat Aceh (1916), Boedi Oetomo (Januari 1918), *Volkronderwijsbond* Aceh (Desember 1918), Islam menjadi Satu (1919), Insulinde (Februari 1919), Kongsi Atjeh Sumatra (Juli 1920), Muhammadiyah (1927), Al-Muslim

(1929), Pusaka (1929), Taman Siswa (1932), Parindra (1939), PUSA (1939), serta pelbagai organisasi serikat kerja dari kepanduan.

Organisasi-organisasi pergerakan seperti yang disebutkan di atas oleh para cendekiawan Aceh pada umumnya dijadikan sebagai wadah kegiatan politik mereka. Melalui organisasi inilah (sekalipun bukan partai politik) rakyat Aceh melalui para intelektualnya menyalurkan aspirasi politiknya. Mereka menyalurkan keinginan politik dengan cara lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Bahkan, sekolah-sekolah agamapun tidak jarang dijadikan sebagai tempat propaganda anti Belanda. Keadaan seperti ini semakin tampak jelas setelah tahun 1927 yaitu sejak Syarikat Islam (SI) tidak diizinkan melakukan kegiatannya di Aceh.

Penelitian ini memfokuskan pada salah satu organisasi masyarakat yang pernah berkiprah di Aceh. Organisasi masyarakat yang dimaksud adalah Persatuan Ulama Seluruh Aceh, yang disingkat dan dikenal secara luas dengan nama PUSA. Salah satu alasan dipilihnya organisasi ini adalah karena PUSA merupakan organisasi yang sangat fenomenal bagi masyarakat Aceh. Rusdi Sufi (1998) menyatakan PUSA merupakan organisasi masyarakat khas Aceh di masa pergerakan nasional. Bahkan, karena begitu fenomenalnya PUSA ini, maka dapat kita sejajarkan dengan Boedi Oetomo yang ada di Pulau

Jawa.² Kajian awal dari penelitian ini menunjukkan bahwa PUSA menempati posisi yang strategis di dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh.

B. Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di bagian atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama bagaimanakah dinamika, baik internal maupun eksternal yang dialami oleh PUSA selama perjalanan keorganisasiannya ? Kedua, bagaimana peran dan kedudukan PUSA di dalam kehidupan sosial budaya masyarakat ? Ketiga, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan PUSA ?

Ketiga pertanyaan di atas merupakan masalah utama yang akan dijelaskan melalui penelitian ini. Usaha menjawab pertanyaan pertama adalah usaha memahami proses dinamika/perubahan yang terjadi di dalam tubuh organisasi PUSA. Pertanyaan kedua mengarah kepada pemahaman terhadap kiprah dan sumbangan yang diberikan oleh PUSA terhadap perjalanan sejarah masyarakat Aceh, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pertanyaan ketiga mengarah kepada pemahaman terhadap reaksi masyarakat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh PUSA.

²Rusdi Sufi. *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900-1942)*. (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1998). Hlm. 62.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berbagai tulisan tentang PUSA pernah orang buat, namun di antara tulisan-tulisan tersebut belum ada yang membahas PUSA secara holistik dan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengurangi kelemahan atau melengkapi tulisan yang terdahulu dan menjadikannya sebagai sebuah penelitian yang bersifat holistik dan komprehensif. Adapun tujuan penelitian ini secara terperinci adalah untuk mengungkapkan lebih jelas latar belakang keberadaan organisasi PUSA dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan untuk mengetahui peranan serta kedudukan PUSA. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap lebih jauh dan jelas, serta untuk mengungkap lebih jelas nama-nama tokoh serta latar belakang para pemimpin PUSA.

Penelitian ini secara garis besar memberi dua manfaat. Pertama, adalah manfaat secara akademis, yaitu dapat memberikan tambahan pengetahuan yang berguna dalam rangka pengembangan ilmu sejarah, khususnya yang berkaitan dengan kiprah PUSA dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh. Dengan dibahas kiprah PUSA tersebut, maka pengetahuan para pembaca akan menjadi bertambah.

Manfaat kedua, yang juga tidak kalah pentingnya adalah manfaat secara praktis, yaitu akan dapat dipergunakan sebagai pengalaman masa lalu yang diceritakan dalam tulisan ini, untuk menentukan langkah dan tindakan yang lebih baik di masa-masa yang akan

datang dalam upaya menjaga keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup pengungkapan penelitian ini adalah kiprah PUSA dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, ruang lingkup temporal dalam penelitian adalah dimulai dari organisasi didirikan (1939) hingga berakhir (1965) keberadaan organisasi ini. Sedangkan ruang lingkup spasialnya dibatasi di Aceh karena kiprah organisasi berada di daerah ini.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan sejarah, dasarnya berpangkal pada bekas-bekas peninggalan atau sisa-sisa ingatan tentang suatu kejadian, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Bekas peninggalan atau sisa ingatan masa lalu tersebut disebut sumber sejarah. Karena itulah, para peneliti dan penulis sejarah menggunakan sumber-sumber tersebut dan kemudian mengolahnya menjadi fakta-fakta sejarah. Akhirnya sintesa dari fakta-fakta itu disusun menjadi suatu kisah sejarah (historiografi).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka proses untuk menghasilkan suatu karya/kisah sejarah, menuntut seseorang tetap berpegang pada metode sejarah. Sebab dengan metode sejarah itulah peristiwa kesejarahan dapat diungkapkan secara lebih mendalam dan dapat pula

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dapat merealisasikan tugas pengungkapan kisah sejarah mengenai dinamika dan peranan PUSA dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh. Sesuai dengan pokok masalah yang diambil, maka metode kerja yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Heuristik

Heuristik yaitu mencari, menelusuri, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah dan keterangan dengan cara:

1. Studi pustaka

Dilakukan terutama pada instansi/lembaga yang terkait seperti museum dan perpustakaan Yayasan Ali Hasjmy yang ada di Banda Aceh. Selanjutnya juga melakukan pengumpulan sumber di perpustakaan yang ada di Badan Arsip Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Perpustakaan PDIA³ (Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh), Perpustakaan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh dan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Pengumpulan buku-buku di perpustakaan-perpustakaan yang ada di kota Banda Aceh tersebut

³Lembaga ini sejak 26 Desember 2004 gedung dengan seluruh isinya telah menjadi korban keganasan gempa dan *Ie Beuna*/Tsunami

dilakukan dengan maksud untuk menelusuri dan memperoleh sumber/keterangan tertulis yang erat kaitannya dengan pokok masalah, seperti dokumen dan karya tulis berupa hasil terbitan seperti buku-buku, brosur-brosur, makalah dan sebagainya.

2. Wawancara.

Dilakukan terutama pada saat studi lapangan pada lokasi terjadinya peristiwa. Cerita itu bertujuan untuk memperoleh sumber/keterangan secara lisan, baik yang berasal dari para tokoh masyarakat setempat, pelaku sejarah/mantan pengurus PUSA yang masih hidup dan tinggal di Banda Aceh maupun para informan lainnya, yang dianggap mengetahui adanya peristiwa yang sedang diteliti.

b. Kritik atau mempersoalkan sumber

Kritik sumber yaitu mempersoalkan otentik tidaknya suatu sumber. Mengenai asli tidaknya suatu sumber harus dijawab dengan analisis sumber. Analisis sumber mencoba mengetahui apakah suatu sumber itu asli atautkah turunan. Sumber asli sudah barang tentu lebih tinggi mutunya dari pada sumber turunan atau salinan. Sedangkan untuk mengetahui utuh tidaknya suatu sumber harus diatasi dengan melakukan kritik teks. Dengan adanya kritik teks, akan dapat diketahui bagaimana sesungguhnya isi sumber asli. Kemudian melakukan kritik ekstern dan kritik interen. Di sini kritik intern dapat mulai

bekerja, jika kritik ekstern selesai menentukan bahwa dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari. Kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh sumber itu memang dapat dipercaya. Bukti-buktinya diperoleh dengan cara melakukan penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber dan membandingkan kesaksian dari pelbagai sumber.

Kritik atas sumber dilakukan baik pada asal sumber hasil studi pustaka maupun asal sumber hasil lapangan/wawancara. Hal ini disebabkan tidak semua keterangan sumber mengenai peristiwa yang diamati mutlak diterima. Kadang-kadang tidak terelakkan bahwa pada setiap keterangan, baik sumber tertulis maupun sumber lisan serta sumber-sumber lainnya yang diperoleh itu mengandung nilai subjektif yang acap kali terbawa pada setiap keterangan yang dibutuhkan.

- c. **Interpretasi:** menafsirkan keterangan dari sumber-sumber yaitu fakta-fakta sejarah, yang kemudian disintesis.

Setelah melakukan kritik intern, kita telah dapat menghimpun banyak sekali informasi mengenai suatu periode sejarah yang sedang kita pelajari. Berdasarkan semua keterangan itu dapat disusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelbagai fakta yang lepas satu sama lain itu harus dirangkaikan dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang selaras dan masuk akal. Tidak semua fakta dapat dimasukkan karena yang diambil hanyalah yang relevan.

d. Historiografi atau penulisan sejarah.

Pada tahap ini peneliti melakukan penulisan dengan merangkaikan sejumlah fakta yang relevan, sehingga terwujudlah suatu tulisan sejarah sebagai cerita yang menyangkut mengenai Sejarah Keormasan di Aceh (Studi Dinamika dan Peranan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dalam kehidupan Sosial Budaya). Untuk itu naskah ini ditulis secara deskriptif analitis.

BAB 2

ACEH: DARI REVOLUSI FISIK HINGGA PERJUANGAN POLITIK

A. Perjuangan Melawan Kolonialis Belanda

Secara geografis, Aceh terletak di tepi Selat Malaka, maka Aceh penting dilihat dari sudut lalu lintas internasional. Ia merupakan pintu gerbang sebelah barat kepulauan Indonesia. Sejak zaman Neolithikum, Selat Malaka merupakan terusan penting dalam migrasi bangsa di Asia, misalnya gerak ekspansi kebudayaan India dan sebagai jalan niaga dunia Selat Malaka adalah jalan penghubung antara dua pusat kebudayaan Cina dan India. Muncul dan berkembangnya kerajaan di sekitar wilayah ini tidak mungkin dipisahkan dari letak geografisnya yang sangat strategis tersebut. Karena keadaan geografis yang strategis ini, Aceh banyak didatangi oleh berbagai bangsa asing dengan berbagai macam motif dan kepentingan, baik budaya, politis, maupun ekonomis.

Di antara bangsa asing (Barat) terdapat bangsa yang bermaksud menancapkan kuku kekuasaannya di bumi

Aceh. Salah satu bangsa asing pertama yang menghadapi per-lawanan rakyat Aceh adalah Portugis. Sejak Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511, Aceh merasa kedudukannya terancam. Karena-nya Aceh mencoba melawan dan mengusir Portugis dari Malaka. Konflik Aceh-Portugis ini berlangsung sepanjang abad XVI hingga akhir perempatan abad XVII.

Bangsa asing lain yang berusaha menancapkan kuku kekuasaannya di bumi Aceh adalah Belanda. Rintisan permakluman perang Aceh oleh Belanda diumumkan oleh komisaris pemerintah yang merangkap Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda F.N. Nieuwenhuizen, diawali dengan penandatanganan Traktat Sumatra antara Belanda dan Inggris dalam tahun 1871, yang antara lain "memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Pulau Sumatra" sehingga tidak ada kewajiban lagi bagi Belanda untuk menghormati hak dan kedaulatan Aceh yang sebelumnya telah diakui, baik oleh Belanda maupun Inggris seperti yang tercantum di dalam Traktat London yang ditandatangani pada tahun 1824.

Pada hari Rabu tanggal 26 Maret 1873 dari geladak kapal perang Citadel Van Antwerpen - yang berlabuh di antara pulau Sabang dengan daratan Aceh - Belanda memaklumkan perang kepada Aceh. Namun demikian, permakluman perang tersebut tidak serta merta diikuti dengan kegiatan fisik militer karena Belanda masih menunggu terhimpunnya kekuatan perangnya yang sedang bergerak menuju Aceh dan kapal-kapal perang Belanda yang telah tiba di Aceh terus melakukan

pengintaian dan provokasi di perairan Aceh. Selain itu, Belanda mengirim surat kepada Sultan yang meminta agar ia mengakui kedaulatan Belanda. Dinyatakan pula bahwa Aceh telah melanggar pasal-pasal perjanjian pada tahun 1857. Batas waktu yang diberikan 1 x 24 jam oleh Belanda kepada Sultan Aceh, menunjukkan bahwa Belanda benar-benar akan menyerang. Jawaban yang diberikan Sultan jauh dari memuaskan bahkan ditegaskan bahwa di dunia tidak seorang pun yang berdaulat kecuali Allah semata.¹

Dihadapkan dengan kenyataan perang yang akan segera meletus, maka Aceh melakukan mobilisasi, baik di sekitar pantai yang berhadapan langsung dengan armada Belanda seperti di sekitar Ulee Lheue, Pantai Ceureumen, Kuta Meugat, Kuala Aceh maupun di tempat strategis lainnya serta pusat-pusat kekuatan di Masjid Raya, Peunayong, Meuraksa, Lam Paseh, Lam Jabat, Raja Umong, Punge, Seutuy, dan di sekitar *Dalam* (Kraton Sultan).

Tindak lanjut dari permakluman perang Belanda kepada Aceh menjadi kenyataan. Pada tanggal 6 April 1873 dengan kekuatan 3.200 prajurit dan 168 perwira yang dipimpin J.H.R. Kohler, Belanda mendaratkan pasukannya di Pantai Ceureumen. Dengan demikian, suatu perang kolonial resmi telah dikibarkan oleh pihak Belanda. Perang ini kemudian dikenal oleh masyarakat Aceh sebagai

¹Muhammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad*. (Medan: Penerbit Pengarang Sendiri, 1961), hlm. 397

"Perang Belanda atau Perang Kaphe Ulanda", yang oleh Belanda dikenal dengan "Perang Aceh".²

Pantai Ceureumen pun menjadi lautan darah. Banyak anggota pasukan Belanda dan rakyat Aceh yang gugur.³ Walaupun demikian, penyerangan pertama Belanda ini dianggap gagal karena serangan ini tidak berhasil menundukkan Aceh. Di samping kuatnya perlawanan, kurangnya informasi tentang Aceh serta keadaan musim yang tidak menguntungkan menjadi sebab serangan pertama Belanda ini gagal. J.H.R. Kohler sebagai panglima perang pun tewas tertembak oleh seorang anggota pasukan Aceh di dekat Masjid Raya. Belanda tidak dapat menguasai kraton. Mereka dipukul mundur dengan menderita kekalahan berat, 45 orang tewas termasuk 8 opsiernya serta 405 orang luka-luka di antaranya 23 opsir. Pada tanggal 29 April 1873 pasukan Belanda ditarik kembali ke Batavia.⁴

Kegagalan ekspansi pertama ini menyebabkan pemerintah Belanda melipatgandakan pasukannya untuk menundukkan Aceh. Untuk itu, Pemerintah Hindia Belanda memanggil seorang pensiunan jenderal, J. Van

²Ismail Sofyan, *Perang Kolonial Belanda di Aceh, The Dutch Colonial War in Aceh*. (Banda Aceh: PDIA, 1990). hlm. 26.

³A. Reid, *The Contest for North Sumatra Atjeh, The Netherlands Britain 1858-1898*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969). hlm. 288-289.

⁴Ismail Sofyan, *op.cit.*, hlm. 85.

Swieten. Ia diangkat sebagai panglima perang pada agresi kedua ini dengan kekuatan 249 perwira dan 6.950 tentara.⁵ Dipundaknya terdapat tugas berat untuk menyerang dan merebut Aceh dan kepadanya juga diberi wewenang mengadakan perjanjian dengan sultan. Selain menjadi panglima perang, ia diangkat pula sebagai Komisaris Pemerintah Hindia Belanda di Aceh.

Dalam agresi kedua ini Belanda berhasil menduduki istana dan Mesjid Raya pada tanggal 24 Januari 1874. Namun Belanda tidak berhasil menangkap Sultan beserta keluarga dan pengikutnya sudah lebih dulu menyingkir ke Luengbata pada tanggal 15 Januari 1874 sehingga usaha Van Swieten untuk menangkap sultan menemui kegagalan. Di tempat baru ini Sultan mendirikan markas pertahanannya. Bersama-sama dengan Panglima Polem dan para pengikutnya yang lain bertekad untuk meneruskan perjuangan melawan Belanda. Namun nasib buruk tidak dapat dihindari Sultan Mahmud Syah, ia diserang wabah kolera dan mangkat pada tanggal 29 Januari 1874 di Pagar Air dan dimakamkan di Cot Bada.⁶ Sebagai penggantinya diangkatlah Sultan Muhammad Daud yang masih kecil sebagai Sultan Aceh. Namun karena Sultan Muhammad Daud belum dewasa, maka diangkatlah Tuanku Hasyim sebagai pemangku sultan (1874 - 1884).

⁵*Ibid.* hlm. 28

⁶Marwati Djoened Pusponogoro, et.al., *Sejarah Nasional VI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982). hlm 249.

Sejak itulah pemerintah Belanda dengan bermacam-macam siasat politiknya berusaha menaklukkan seluruh Aceh seperti yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pembesar kerajaan, panglima dan rakyat Aceh yang masih mencintai kemerdekaan mengungsi ke pedalaman dan mengadakan perlawanan.

Walaupun dari segi persenjataan dapat dikatakan kurang apabila dibandingkan dengan Belanda, tetapi rakyat Aceh mempunyai modal kekuatan lain yang sukar dipatahkan oleh Belanda, yaitu ikut serta-nya semua lapisan rakyat, para Tuanku, *uleebalang*, ulama, rakyat biasa sehingga perang ini dapat dikatakan perang rakyat semesta (*volks oorlog*).

Para ulama menyerukan kewajiban "perang sabil" sehingga dapat menumbuhkan persatuan yang kuat atas dasar kesadaran mereka sebagai umat Islam. Dalam kesiapsiagaan untuk berperang mereka umumnya memusatkan kekuatannya dalam kuta-kuta pertahanan (Kuta Meugat, Kuta Pohama, Kuta Mosapi, Kuta Aneuk Galong, Kuta Bate Iliak, dan lain-lain). Kuta-kuta ini dipertahankannya dengan mati-matian.

Sejak Pel digantikan oleh G.B.T. Van Kerchem posisi Belanda bertambah sulit. Ia kurang mampu menghadapi laskar Aceh yang sering menembus pos-pos di sekeliling Kutaraja, dan bahkan daerah-daerah lain yang dikuasai Belanda. Karena itu, satu tahun kemudian ia diganti oleh Diemont. Namun kenyataan perlawanan rakyat tidak dapat dibendung. Setelah sebelas tahun berperang, Belanda

makin tampak tidak berdaya. Oleh karena itu kemudian diputuskan dipakai strategi "stelsel konsentrasi" di Aceh.

Sehubungan Sultan Muhammad Daud sudah beranjak dewasa, maka ia menerima jabatan dari pemangku sultan, Tuanku Hasyim, pada akhir tahun 1884 dalam sebuah acara resmi di Mesjid Indrapuri. Saat bersamaan, para pemimpin Aceh seperti Panglima Polim Ibrahim Muda Kuala, Teungku Chik Di Tiro, dan lain-lain mencetuskan ikrar perang sabil, yang pernah pula dicetuskan di istana sebelum pendaratan Belanda.

Ikrar ini telah memberi semangat kepada para laskar dan melahirkan pejuang-pejuang yang tangguh dan gigih. Banyak pejuang yang gugur dalam pertempuran, di antaranya, Teuku Imeum Lueng Bata, Panglima Polem Mahmud Cut Banta (1879), Teuku Ibrahim Lam Nga (1878), Tuanku Hasyim (1891), Teungku Chik Di Tiro (1891), Teungku Muhammad Amin Tiro (1896), Teuku Umar (1899), dan lain-lain.

Di pihak lain, karena ikrar perang sabil itu pula mendorong Belanda melancarkan serangan besar-besaran yang oleh Van't Veer disebut sebagai masa 10 tahun (1899-1909) berdarah di Aceh karena telah merenggut 21.865 jiwa rakyat Aceh (kira-kira 4 persen dari jumlah penduduk saat itu).⁷

⁷Paul Van't Veer, *De Atjeh Oorlog*. (Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspress, 1969). Hlm 260. Lihat juga Rusdi Sufi et. Al., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. (Jakarta: Proyek IDSN, 1991), hlm. 121.

Dalam rangka menyelesaikan perang agar tidak terus berkepanjangan ini, Belanda menugaskan Snouck Hurgronje untuk mengadakan penelitian. Hasil penelitian, rakyat Aceh yang taat beragama Islam tidak mungkin menyerah sebelum mereka ditundukkan dengan kekerasan, sikap menunggu dan kompromi tidak akan membawa hasil.⁸

Hasil penelitian ini dijabarkan dengan membentuk korps *Marechaussee*, pasukan berani mati dan sangat kejam. Dengan gerak cepat, pasukan ini akhirnya dapat menaklukkan daerah-daerah sejak dari Aceh Besar sampai ke pantai timur.

Akhirnya, karena mendapat tekanan yang terus menerus dan tertangkapnya istri sultan, Pocut Murong, maka Sultan pun terpaksa menyerah, pada tahun 1903. Dengan ini berakhir pula pemerintahan Kerajaan Aceh, walaupun perlawanan masih terus berlangsung.

Melihat situasi bahwa masyarakat Aceh sukar untuk ditaklukkan, maka pemerintah Hindia Belanda merubah lagi kebijaksanaanya dalam cara menaklukkan Aceh. Mereka melakukan suatu kebijaksanaan baru yang disebut politik pasifikasi, yang merupakan pengembangan ide dari C. Snouck Hurgronje. Suatu politik yang menunjukkan sikap damai yang ditunjukkan melalui berbagai usaha dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Melalui politik ini Belanda mulai memperlihatkan sikap lunak kepada masyarakat Aceh. Untuk "mengamankan" Aceh,

⁸*Ibid.* hlm. 122.

mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalkan kekerasan, tetapi juga usaha-usaha lain yang dapat menarik simpati rakyat.

B. Politik Pasifikasi dan Terbentuknya Masyarakat Berpendidikan

Sebagai tindak lanjut politik pasifikasi yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda, maka pada permulaan abad ke-20 Aceh menerima sistem pendidikan Barat dari pemerintah. Sebelumnya, pendidikan di Aceh lebih banyak berorientasi kepada pendidikan keagamaan. Pendidikan ini diberikan melalui sistem pendidikan dayah atau pesantren. Masuknya, pendidikan yang diperkenalkan oleh Belanda memberikan sebuah alternatif baru bagi masyarakat Aceh, tidak hanya mencakup pendidikan keagamaan.

Sebagai awal perkenalan sistem pendidikan ini, maka pada tahun 1900 beberapa putra *uleebalang*⁵ di antaranya dua orang saudara dari *uleebalang* Idi Rayeuk, diikutsertakan untuk mengikuti pendidikan pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja. Selanjutnya, pada tahun 1901 tiga putra *uleebalang* lainnya dari daerah Aceh Besar dikirim pula dan sesudah bersekolah pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja oleh Belanda dikirim ke Fort de Kock (sekarang Bukit Tinggi) untuk memasuki sekolah guru di sana. Pada tahun 1907/1908 hingga tahun dua puluhan terdapat

⁵Kelompok ini dipilih karena diharapkan dapat menjadi "jembatan" antara pemerintah dengan rakyat.

sejumlah putra-putra *uleebalang* yang dikirim ke luar Aceh untuk mengikuti berbagai pendidikan yang dikelola oleh pemerintah Belanda. Misalnya, *Hoofdenzoonsschool* di Asahan, OSVIA di Bandung dan Serang, *Bestuurschool* di Batavia dan MOSVIA di Madiun.

Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga memberi kesempatan kepada pemuda-pemuda Aceh lainnya yang bukan dari golongan *uleebalang*. Hal ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan pegawai rendahan, mengurangi pengaruh dari pemimpin-pemimpin agama atau para ulama dalam mengurangi kefanatikan mereka terhadap permusuhan dengan Belanda. Untuk ini, pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah rendah atau sekolah rakyat seperti halnya sekolah desa di Pulau Jawa. Di Aceh, pada mulanya sekolah-sekolah jenis sekolah ini disebut dengan nama sekolah *mukim*.

Pada awalnya, pendirian sekolah rakyat dilakukan di *gampong-gampong* di Aceh. Namun pendirian sekolah ini bukan tanpa masalah. Selain karena kekurangan guru dan sedikitnya guru yang dapat berbahasa Aceh, masalah ini juga datang karena para *teungku-teungku* atau para pemimpin agama (ulama) banyak yang tidak setuju. Selain itu, banyak para orang tua murid yang menganggap sekolah-sekolah buatan Belanda ini bersifat kafir.⁶

⁶T. Ibrahim Alfian, "Pendidikan dalam Proses Pembangunan Bangsa Kasus di Aceh", *Makalah* disampaikan pada Hari Ulang Tahun ke-52 PGRI Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh.

Sehubungan dengan itu, pemerintah Hindia Belanda di Aceh memberi pengertian bahwa pendidikan yang mereka berikan kepada rakyat melalui sekolah rakyat tidak bertentangan dengan *hukom* atau syariat agama. Pelajaran yang diberikan pada sekolah rakyat ini pada umumnya adalah membaca (tulisan latin dan bahasa Aceh), menulis dalam huruf Latin dan huruf Arab serta dikte dalam kedua huruf tersebut. Selain itu diberikan juga pelajaran tentang berhitung dan pecahan sederhana, latihan berbicara dan bercakap-cakap, serta sedikit diberikan pelajaran pengetahuan Ilmu Bumi tentang Hindia Belanda (Indonesia). Uang sekolah yang dibebankan pun tidak terlalu besar, yaitu 5 sampai 10 sen saja.⁷

Adapun sekolah rakyat atau sekolah desa pertama yang dibuka di Aceh pada tanggal 30 Desember 1907 oleh Gubernur Militer/Sipil dan Daerah-daerah takluknya pada masa itu, Van Daalen. Sekolah ini didirikan di wilayah Aceh Besar distrik Ulee Lheue yang diberi nama *sikula mukim* (sekolah *mukim*) dengan jumlah murid 38 orang. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 1908 dibuka lagi sekolah serupa dengan jumlah murid 35 orang. Di bawah pemerintahan Gubernur Swart pada tanggal 10 Juni 1908 sekolah-sekolah rakyat ini semakin dikembangkan. Pada akhir tahun 1908 jumlah sekolah ini di wilayah Aceh Besar sudah mencapai 21 buah dan hingga bulan Desember 1909 jumlah ini untuk daerah Aceh telah mencapai 63 buah. Pada tahun 1910 jumlah ini meningkat lagi menjadi 85 buah. Menjelang masa akhir pemerintah Hindia Belanda di

⁷ Rusdi Sufi, *op.cit.*, hlm. 18

Aceh (1939) jumlah sekolah-sekolah rakyat atau sekolah desa di seluruh Aceh mencapai 348 buah dengan lebih dari 600 orang pendidik dan lebih dari 36.000 orang murid.⁸

Selain sekolah rakyat, pada tahun yang hampir bersamaan, pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk anak perempuan atau yang disebut *Meijescholen*. Sekolah khusus anak perempuan ini pertama didirikan pada tanggal 1 Mei 1910 di distrik Ulee Lheue, Mukim Meuraksa. Pendirian sekolah ini dibantu oleh *uleebalang* setempat, Teuku Tengoh. Pada pertengahan tahun 1914 jumlah sekolah-sekolah putri yang didirikan oleh pemerintah sudah mencapai 7 buah yang lokasinya menyebar di seluruh *afdeling* di Aceh. Perkembangan sekolah putri ini meskipun tidak sepesat perkembangan pada sekolah rakyat, tetapi setiap tahun juga menunjukkan peningkatan kuantitasnya.

Untuk menunjang pendidikan di Aceh, pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sebuah *Normal Cursus* dengan maksud khusus untuk mendidik guru-guru sekolah rakyat untuk daerah Aceh. Kursus ini mulai dibuka pada tanggal 7 Februari 1907 dengan murid 12 orang.

Selain sekolah-sekolah yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga mendirikan sekolah lanjutan rakyat yang disebut *vervolgschool* (sekolah sambungan atau lanjutan). Sekolah ini diperuntukkan bagi murid-murid dari sekolah rakyat atau sekolah desa yang berhasil menamatkan pelajarannya. Adapun masa belajar pada sekolah ini adalah

⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

selama dua tahun. Sesuai dengan namanya sekolah lanjutan ini kadang-kadang ada yang ditempatkan dalam satu bangunan dengan sekolah-sekolah rakyat. Pada umumnya gedung dan perlengkapan yang digunakan masih sangat sederhana. Pelajaran yang diberikan oleh sekolah ini adalah sebagai lanjutan pelajaran yang diberikan di sekolah rakyat. Sekolah-sekolah ini dimasuki oleh anak-anak rakyat atau anak penduduk *gampong* yang ekonomi mereka lebih baik dan juga anak-anak dari pegawai rendahan, dengan tujuan agar anak-anak mereka dapat menikmati pendidikan lebih lanjut pada sekolah rakyat.

Di samping sekolah-sekolah lanjutan atau sambungan, di Aceh juga terdapat jenis pendidikan dasar milik pemerintah lainnya, yaitu *Hollandsch Inlandsche School* (HIS). Pendidikan ini mempunyai masa belajar selama 7 tahun. Gedung dan perlengkapan yang digunakannya lebih baik daripada sekolah lanjutan/rakyat. Adapun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Kurikulum pelajaran yang digunakan meliputi bahasa Belanda, berhitung, ilmu bumi, sejarah, biologi, melukis, dan olahraga. Pelajaran ini diberikan dalam bahasa Melayu atau bahasa Belanda. Pendidik pada umumnya terdiri dari orang-orang pribumi, tetapi semua guru kepala pada sekolah ini dipegang oleh orang-orang Eropa atau Belanda.

Karena persyaratan yang ketat, maka hanya anak-anak golongan bangsawan dan anak-anak dari mereka yang mempunyai kedudukan saja yang bersekolah di HIS

ini. Sekolah ini pun didirikan terbatas hanya di kota-kota besar saja, seperti di Kutaraja, Lhokseumawe dan Langsa.

Selain HIS yang khusus untuk anak-anak orang pribumi, pemerintah Hindia Belanda di Aceh juga mendirikan sebuah sekolah yang dinamakan *Hollandsch Chinese School* (HCS) yang diperuntukkan khusus untuk anak-anak orang Cina yang didirikan di Kutaraja dan Tapak Tuan, *Hollandsch Ambonsche School* yang diperuntukkan bagi anak-anak orang Ambon yang berdinias pada militer Belanda, khususnya yang berada di Kutaraja yang didirikan di Kutaraja pada bulan Oktober 1911.

Pendidikan dasar lainnya yang juga terdapat di Aceh adalah yang disebut *Eropeesche Lager School* (ELS) yang berarti sekolah rendah Eropa. Sesuai dengan namanya, sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak orang Eropa dan sebagian kecil saja anak-anak dari golongan bangsawan.

Berdasarkan laporan inspektur pendidikan sekolah-sekolah pribumi putra, A. Vogel, dapat diketahui pula bahwa di Aceh juga terdapat jenis pendidikan dasar lainnya yang disebut *De 2de klasse Scholen* (Sekolah Kelas Dua), dan *Inlandsche School* (Sekolah Pribumi). Kedua sekolah ini dinamakan *Inlandsche Gouvernementsscholen* (Sekolah Bumiputra Pemerintah). Untuk membantu persiapan memasuki pendidikan dasar, pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan lembaga yang disebut *voorbereiden onderwijs*. Lembaga ini mulai didirikan pada tahun 1915 di

Kutaraja yang mempunyai dua sekolah yaitu *de neutrale Frobelschool* dan *de Roomschkatholieke Frobelschool*.

Menurut laporan umum pendidikan di Hindia Belanda tahun 1928 telah didirikan pula sekolah yang disebut *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yang sejak jaman pendudukan Jepang hingga sekarang dikenal dengan nama Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sekolah ini merupakan lembaga pendidikan pemerintah Hindia Belanda paling tinggi yang ada di Aceh dan didirikan pertama kali pada tahun ajaran 1920/1921 di Kutaraja dengan lama masa belajar 3 tahun. Pada tahun 1935 jumlah murid sekolah ini adalah 79 orang.

Pada mulanya maksud didirikan sekolah MULO ini adalah untuk menampung lulusan HIS dan ELS yang berkeinginan untuk melanjutkan pelajarannya, juga dalam rangka untuk mendidik kader-kader *uleebalang* yang trampil. Memang pada awal didirikan sekolah ini diperuntukkan bagi putra-putra *uleebalang*, namun sejak masa Residen Jongejans (1936-1938) mulai terbuka kesempatan yang luas kepada suku bangsa (baik Eropa maupun pribumi) untuk memasuki sekolah MULO. Menurut Jongejans pada masa itu di antara murid-murid sekolah itu juga terdapat beberapa putra Aceh dari golongan bangsawan. Menjelang akhir pemerintah Hindia Belanda di Aceh, jumlah sekolah ini tetap 1 buah, tetapi perhatian masyarakat terhadap jenis pendidikan ini semakin besar.

Akibat dari adanya pendidikan yang diusahakan pemerintah melalui politik pasifikasi ini telah lahir satu golongan yang berpendidikan menengah baru di Aceh.

C. Dari Revolusi Fisik Ke Perjuangan Politik

Seperti yang telah diuraikan di atas, dengan diperkenalkannya sistem pendidikan Belanda, dalam perkembangannya telah melahirkan suatu kelompok baru dalam masyarakat Aceh. Mereka ini menjadi pendukung utama dari sistem pendidikan itu di daerah Aceh. Kehadiran kelompok ini telah mengundang kecemasan kelompok lain yang sudah *established*, lebih-lebih kelompok baru itu menunjukkan kelebihan-kelebihan tertentu yang diperkirakan dapat mendesak posisi yang dimiliki oleh kelompok yang telah ada. Dengan demikian, dengan kehadiran kelompok baru tersebut, dianggap sebagai suatu ancaman dan tantangan terhadap mereka, yaitu kelompok yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang tradisional. Untuk mengimbangi kelompok baru itu, kelompok yang tersebut terakhir berusaha untuk meningkatkan diri, terutama dengan mengkoordinir lembaga-lembaga pendidikan yang mereka miliki.

Dalam perkembangannya, pemuda-pemuda Aceh yang telah menyelesaikan pendidikan pada sekolah-sekolah pemerintah kolonial Belanda dan juga dari sekolah-sekolah agama yang modernis sebagiannya menjadi tokoh-tokoh yang memelopori munculnya kesadaran nasionalisme di daerah Aceh. Di antara putera-putera *uleebalang* ini ada

yang tetap berpihak kepada kepentingan masyarakatnya dan bahkan juga ada yang tetap menjalin kerjasama dengan para pemimpin agama (ulama) dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Aceh. Misalnya mereka yang menentang dirubahnya bahasa pengantar pada sekolah-sekolah rakyat (*volkschool*) dari bahasa Melayu ke bahasa Aceh pada tahun 1931.⁹ Sebagaimana yang diperlihatkan oleh dua tokoh *uleebalang* terkemuka yang pernah menjadi anggota *volksraad* mewakili daerah Aceh. Nama kedua *uleebalang* ini adalah Teuku Chiek Muhammad Thayeb dan Teuku Nyak Arief.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka selama dalam pendidikan, terutama yang dilihat atau dialami sendiri di luar daerah Aceh, timbul keinginan untuk menghimpun diri dalam wadah tertentu (organisasi modern). Untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat mereka mencoba berjuang dengan cara-cara tidak lagi dengan menggunakan kekerasan (senjata), tetapi melalui organisasi-organisasi, baik yang khas Aceh maupun yang berasal dari luar Aceh. Dengan demikian, pergerakan nasional yang telah muncul di pulau Jawa sejak tahun 1908, bergema pula di daerah Aceh.

Pada tanggal 17 Desember 1916 di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) sekelompok pemuda mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama *Vereeniging Atjeh* (Serikat Aceh). Personalia pengurusnya adalah sebagai berikut : Teuku Chiek Muhammad Thayeb sebagai ketua;

⁹ *mailr.* 504/36: 137

Teuku Tengoh wakil ketua, Nyak Cut Sekretaris I, Abu Bakar sekretaris II Teuku Usen dan Teuku Chieh Muhammad sebagai Bendahara; Teuku Johan Alamsyah dan Teuku Asan I sebagai Komisaris. Sedangkan anggotanya terbuka bagi setiap rakyat Aceh, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah cukup umur dan mau menjadi anggota dengan menaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan organisasi.

Maksud didirikannya organisasi ini secara umum adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Aceh. Sehubungan dengan maksud tersebut, dalam satunya disebutkan:

- a. untuk memajukan dan memperbaiki sistem pengajaran/pendidikan di Aceh;
- b. untuk merubah adat-adat yang menghalangi dan mengekang kemajuan serta memperbaiki span santun yang sedang berlaku dalam masyarakat Aceh pada waktu itu.¹⁰

Disebutkan lebih lanjut dalam satuta itu bahwa cara organisasi ini memajukan pendidikan adalah dengan memberi bantuan kepada anak-anak anggota dan anak-anak saudara kandung yang menjadi anggota perserikatan, serta kepada anak-anak Aceh yang bukan anggota

¹⁰ *mailr.* 3225/20. Lihat juga Rusdi Sufi. "Organisasi Sosial Politik dan Keagamaan di Aceh pada Awal Abad Ke XX", *Makalah* yang disampaikan pada kegiatan Diskusi Integrasi yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh di Aula Museum Negeri Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 22 Agustus 2002.

perserikatan, tetapi telah menamatkan dan mendapat keterangan sebagai anak cerdas dari *Europeesche School* dan *Hollandsch Inlandsche School* yang bermaksud meneruskan pelajarannya ke negeri lain atau ke luar Aceh.¹¹ Selain itu juga, apabila orang tua laki-laki dari murid-murid kedua sekolah meninggal dunia, maka perserikatan juga mengusahakan bantuan supaya murid-murid itu dapat melanjutkan sekolahnya. Terhadap murid-murid yang telah menamatkan pelajarannya dari *Gouvernements Inlandsche School* dan *Volkschool*, bila dianggap perlu oleh organisasi ini juga akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan. Apabila dirasa perlu pengurus organisasi juga akan membantu murid-murid dari *Normaalcursus*, *Ambachtschool* dan *Landbouwschool* dengan biaya sekedarnya.¹²

Sehubungan dengan maksud merubah adat-adat yang dianggap sebagai penghalang dan pengekan kemajuan, disebutkan bahwa adat yang mendatangkan keberatan hendaklah diusahakan mencari jalan ke perubahan yang baik. Misalnya dijaga atau diusahakan supaya anak laki-laki atau perempuan jangan kawin atau dikawinkan di bawah umur 16 tahun (sebelum akil-balig). Juga pesta-pesta yang memboroskan yang berhubungan dengan pesta perkawinan supaya dihindari/ditinggalkan. Dalam hal upacara kematian diusahakan jangan lagi diadakan kenduri-kenduri sebelum dilaksanakan sesuatu

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Sedang hal *poemoe baè* (upacara penangisan jenazah sebelum dikuburkan) harus dihapuskan sama sekali.¹³ Yang berkaitan dengan perbaikan sopan santun, organisasi ini mengusulkan agar didirikan suatu perkumpulan wanita yang bertujuan untuk mengubah segala hal ikhwal dalam rumah tangga terutama yang menyangkut dengan kebersihan, kesopanan dan kesehatan. Untuk ini kalau dirasa perlu perkumpulan wanita yang dibentuk itu boleh menggunakan tenaga seorang wanita Eropa memimpinya.¹⁴ Berkait dengan hal ini, rupa-rupanya organisasi ini telah terpengaruh dengan bantuan-bantuan yang diberikan sebelumnya (sebelum *Vereeniging Atjeh* terbentuk) oleh beberapa orang istri pejabat tinggi Belanda di Aceh. Seperti keikutsertaan Nyonya Swart (istri Gubernur Swart yang menjadi gubernur di Aceh sejak 1908 - 1918), Nyonya Nijs (istri asisten residen Nijs), dan Nyonya Doormik (istri asisten residen Doormik) memberikan jasa-jasa mereka terutama dalam mendidik keterampilan beberapa wanita Aceh, seperti jahit menjahit, merenda, sulam menyulam, adat istiadat, sopan santun dan lain hal yang berhubungan dengan kewanitaan.¹⁵

Organisasi kebangsaan asal orang Jawa yang pertama masuk ke Aceh ialah Serikat Islam (SI). Pada mulanya muncul di Tapak Tuan (Aceh Selatan) pada tahun

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵C.L. "School en Huwelijk of Atjeh", *TBB* (1915)

1916 kemudian muncul pula di tempat-tempat lain seperti di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Beberapa tokoh *uleebalang* seperti Teuku Keujruen Chiek Muhammad Alibasyah *uleebalang* Samalanga, Teuku Abdul Hamid Orang Kaya Sri Maharaja *uleebalang* Lhokseumawe, Teuku Chiek Muhammad Said dari Cunda, Teuku Abdul Latif dari Keudong, dan Teuku Raja Budjang dari Nisam bersama dengan ratusan rakyatnya menjadi anggota Sarikat Islam.¹⁶ Hingga tahun 1920, telah menjadi organisasi politik yang cukup kuat di Aceh, sehingga telah mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda. Karena itu kegiatan-kegiatan pemimpin Sarikat Islam di Aceh selalu diawasi. Pada tahun 1926 pemerintah kolonial Belanda melakukan penangkapan secara besar-besaran terhadap tokoh-tokoh partai tersebut. Penangkapan ini dikaitkan dengan munculnya pemberontakan yang disponsori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1926/1927, yang juga telah merembes ke daerah Aceh. Meskipun mereka yang ditangkap ini bukan anggota Partai Komunis Indonesia. Di antara tokoh SI yang ditangkap ialah: Teuku Chiek Muhammad Said Cunda, Teuku Abdullatif Geudong, dan Teuku Raja Bujang Nisam, masing-masing dibuang ke Tambua (Timur), Sumatera Barat (kemudian ke Bogor, pulau Jawa) dan ke Bouven Digul Irian atau Papua Barat. Sementara salah seorang pemimpin SI lain, yaitu Teuku Syekh Abdul Hamid Samalanga (populer dengan sebutan Ayah Hamid Samalanga) terhindar dari

¹⁶Van Sluijs, "Nota", *Atjeh en Onderhoorigheden*, September 1918 - Oktober 1920, *Kernpapieren*, 797/156; KIT.

penangkapan dan menyingkir dari Aceh dan kemudian menetap di Arab Saudi (Mekkah).

National Indische Partij (NIP) masuk ke Aceh pada bulan Februari 1919. Tokoh partai ialah Teuku Chiek Muhammad Thayeb *uleebalang* Peureulak. Ketua cabang partai ini di Kutaraja dipegang oleh Teuku Nyak Arief. Selain itu pada tahun 1919 Teuku Nyak Arief juga menjadi ketua *Atjeh Vereeniging* (Serikat Aceh) menggantikan Teuku Chiek Muhammad Thayeb yang telah diangkat menjadi anggota *volksraad* (1918-1920) di Batavia. Tampaknya organisasi *National Indische Partij* (NIP) tidak berkembang luas di Aceh, lebih-lebih setelah Teuku Nyak Arief harus berhenti dari keanggotaannya (setidak-tidaknya sebagai ketua), karena pada tahun 1920 diangkat menjadi *Panglima Sagi XXVI mukim* menggantikan orang tuanya¹⁷ dan kemudian juga pada bulan Mei 1923 induk organisasi ini di pulau Jawa telah membubarkan diri.¹⁸ Tokoh NIP yang lain ialah Abdul Karim MS yang berperan di wilayah Aceh Timur. Karena simpatinya kepada NIP, sehingga untuk mengenang keanggotaannya pada organisasi ini, Abdul Karim MS menabalkan nama organisasi ini pada nama putranya, yaitu NIP Karim, yang kemudian juga merupakan seorang tokoh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI di daerah Sumatera Timur. Setelah NIP membubarkan diri, Abdul Karim MS

¹⁷Mardanas Safwan. *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief*. (Jakarta: Proyek Biografi Pahlawan Nasional Depdikbud, 1975).

¹⁸A.K. Priggodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakjat, 1970).

menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia di Aceh Timur dan kemudian diangkat pula menjadi komisaris pengurus besar partai ini untuk daerah Aceh dan Sumatera Timur.

Organisasi yang berasal dari Jawa yaitu *Jong Islamieten Bond* (JIB). Rencana pendirian organisasi cabang ini pada mulanya pada tahun 1928. Pada waktu itu (Juni 1928) seorang pengurus pusat JIB, Azis, putera seorang pensiunan *Groot Atjehsche Afdeelingbank* (Brahim) pulang ke Kutaraja dalam rangka libur sekolah. Akan tetapi usaha itu belum berhasil, baru pada tahun 1930 dengan dukungan Teuku Nyak Arief, cabang JIB dapat didirikan di Kutaraja, Sigli dan Lhokseumawe dengan catatan bahwa organisasi ini tidak mencampuri urusan politik di Aceh, (setiap organisasi Islam yang masuk ke Aceh selalu di curigai oleh pemerintah Hindia Belanda). Cabang Kutaraja juga mendirikan bagian wanitanya yaitu *Jong Islamieten Bond Dames Afdeeling* (JIBDA) dan pada tahun 1931, membuka sebuah sekolah khusus untuk puteri (sekolah rakyat puteri), tetapi pada tahun 1932 sekolah ini dirubah menjadi sekolah campuran (untuk pria dan wanita). Pada tanggal 6 Oktober 1932 JIB mendirikan lagi sebuah cabang di Sabang yang diketuai oleh Abdurrahim dan setelah itu kelihatannya JIB tidak mendirikan cabang-cabang lagi pada kota-kota lain di Aceh.¹⁹

Organisasi Muhammadiyah pada mulanya masuk ke Aceh (Kutaraja) pada tahun 1923; dibawa oleh mantan

¹⁹ *Politieke Politoneel Verslag Betreffende het Gewest Atjeh en Onderhoorigheden*. No. 130x/29, hlm. 91.

sekretaris Muhammadiyah cabang Betawi, S. Djaja Soekarta, yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada Jawatan Kereta Api Aceh. Namun pada waktu itu belum dimungkinkan untuk mendirikan sebuah cabang di Aceh, karena personalia pengurus belum ada. Baru pada tahun 1927 dengan mendapat bimbingan dari seorang utusan pengurus pusat Muhammadiyah yang bernama A.R. Soetan Mansoer, organisasi ini secara resmi berdiri di Kutaraja. Adapun pimpinannya dipilih R.O. Armadinata seorang dokter gigi yang pada waktu itu bertugas di Kutaraja. Selaku konsul pertama dijabat oleh Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong, pegawai kantor pusat kas-kas kenegerian di Kutaraja. Pada tahun 1928 organisasi ini mendirikan pula sebuah perkumpulan wanita, Aisyiyah, yang mengurus hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan dan kemajuan kaum wanita; dan sebuah organisasi kepanduan yang bernama "Hizbul Wathan" dan sebuah lembaga pendidikan HIS.

Dalam perkembangannya Muhammadiyah juga mendirikan cabang-cabang pada beberapa kota lain di Aceh. Di Sigli didirikan pada tanggal 1 Juli 1927, Lhok Seumawe pada bulan Agustus 1927 dengan mendapat dukungan sepenuhnya dari *uleebalang* setempat. Di Kuala Simpang pada tanggal 7 Oktober 1928, Langsa pada tanggal 29 Oktober 1928, Takengon pada bulan Mei 1929 dan Bireun tahun 1928. Cabang-cabang Muhammadiyah tersebut di atas, sebagian besar berlokasi di pantai timur Aceh. Dengan dalih politik Pemerintah Hindia Belanda di Aceh melarang Muhammadiyah mendirikan cabang-cabangnya di wilayah pantai barat Aceh. Namun demikian,

di kota Tapaktuan terdapat sebuah organisasi yang bernama Sumatra Thawalib yang mendapat pengaruh langsung dari perguruan Thawalib Sumatra Barat yang anggota-anggotanya juga sebagai pendukung Muhammadiyah.²⁰ Akan tetapi dalam perkembangan lebih lanjut, sesudah diadakan pendekatan dan persetujuan dengan pemerintah oleh konsul Muhammadiyah sendiri (Teuku Cut Hasan Meuraksa yang menggantikan Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong), maka semenjak tahun tiga puluhan, pemerintah Hindia Belanda telah menyetujui pendirian sebuah cabang Muhammadiyah di Calang (salah sebuah kota di pantai barat Aceh); yang diikuti dengan didirikan sebuah lembaga pendidikan HIS.²¹

Pada masa akhir pemerintahan Belanda di Aceh (1942), jumlah cabang Muhammadiyah di seluruh Aceh tercatat 8 buah. Pada umumnya setiap cabang Muhammadiyah terdapat pula organisasi kepanduan "Hizbul Wathan" dan sejumlah lembaga pendidikan seperti 9 buah HIS, masing-masing terdapat di Kutaraja, Sigli, Lhok Seumawe, Langsa, Kuala Simpang, Calang, Tekengon, Idi dan Meureudu: 1 buah MULO dan 1 Leergang Muhammadiyah (Darul Muallimin) keduanya beralokasi di Kutaraja; 10 buah Diniyah yang terdapat di Kutaraja, Lubok, Sigli, Lhok Seumawe, Takengon, Kuala Simpang,

²⁰Anthony Reid. *The Blood of People*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979). Hlm. 20.

²¹A.J. Piekar. *Atjeh en de Oorlog met Japan*. (Den Haag: W. Van Hoeve, 1949).

Calang, Idi, Meureudu dan Bireun; dan I Taman Kanak-Kanak di Kutaraja.²²

Apabila dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang datang dari Jawa (di antaranya Budi Utomo, Serikat Islam, Insulinde, Taman Siswa, Jong Islamieten Bond (JIB) dan Parindra), Muhammadiyah merupakan organisasi yang relatif dapat hidup dan berkembang di Aceh. Sekelompok cendekiawan Aceh menjadi anggota dan pendukung Muhammadiyah. Melalui organisasi ini mereka menyalurkan aspirasi-aspirasi politik dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya bersifat sosial sehingga telah memberi warna tersendiri bagi Muhammadiyah di Aceh. Kalau di Jawa Muhammadiyah lebih menitikberatkan gerakan pada bidang keagamaan dan sosial, di Aceh di samping yang tersebut di atas, juga turut dalam gerakan-gerakan politik.²³

Pada tahun 1928 di Kutaraja didirikan sebuah organisasi yang bernama *Atjehsche Studiefonds* (Dana Pelajar Aceh). Tujuannya membantu anak-anak Aceh yang cerdas tetapi tidak mampu dalam biaya sekolahnya. Lembaga ini pada tahun 1929 dengan Surat Keputusan Pemerintah Pusat tanggal 1 Februari 1929 No. 25 telah memperoleh hak sebagai badan hukum. Adapun pengurusnya terdiri dari : Tuanku Mahmud dan Teuku Hasan Dik sebagai ketua dan wakil ketua, bendahara, H.M. Bintang, serta komisaris

²²J. Jongejans. *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu* (Baarn: N.V. Hollandia Drukkerij, 1939) . hlm. 261

²³A.J. Piekar, *op.cit.*

Teuku Nyak Arief, Tuanku Djamil, Abidin dan T. A. Salam. Anggotanya terdiri dari para *uleebalang*, guru-guru dan pedagang yang pada saat mula dibentuk berjumlah 137 orang.²⁴ Sementara di Peureulak (Aceh Timur) pada tahun 1929 berdiri sebuah organisasi pendidikan yang bernama *School Vereeniging PUSAKA* (Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak). Tujuannya adalah untuk mendirikan sebuah sekolah rendah berbahasa Belanda seperti *Holland Inlandsche School (HIS)*. Pengurusnya terdiri dari Teuku Chiek Muhammad Thayeb (*uleebalang* Peureulak) sebagai pelindung; Teuku Cut Ahmad sebagai penasihat; T.M. Nurdin sebagai ketua; H.M. Zainuddin selaku penulis; dan Muhammad Hasyim sebagai bendahara, serta T.M. Hasan, Teuku Itam Osman, Teuku Sabi dan Muhammad Syam masing-masing sebagai komisar.²⁵

Dalam rangka memajukan bidang seni di daerah Aceh, pada tahun 1908 di Ulee Lheue didirikan sebuah organisasi musik yang diberi nama *Atjeh Bond*. Bertindak sebagai sponsor dan pengawasnya Teuku Teungoh *uleebalang* Meuraksa. Sebagai guru/pengajar ditunjuk seorang Indo Jerman yang bernama A. Theveunet dan sebagai ketua korps pemain ialah Teuku Husein Trumon, alumni Sekolah Raja Bukit Tinggi. *Atjeh Bond* ini pada tahun 1909 ikut bermain memeriahkan pasar malam yang

²⁴ *Mail*: 10.

²⁵ H.M. Zainuddin, *Bungong Rampo*. (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1965). Hlm. 127-129.

dilangsungkan di Kutaraja dan mendapat sambutan baik dari masyarakat Aceh. Pada tahun 1919 juga ikut berperan dalam Pekan Kebudayaan yang diselenggarakan oleh organisasi *Atjeh Vereeniging* (Serikat Aceh) di Kutaraja. Langkah *Atjeh Bond* diikuti pula oleh beberapa kenegerian di Aceh. Seperti di Peureulak pada tahun 1930 muncul *Jolly Night Bond* serta *Tugep* (*Tuneel Genelschap Peureulak* dan di Jeunib (Aceh Utara) tahun 1937 *Liliput Band* di bawah asuhan Teuku Ahmad *uleebalang* Cut Jeunib.²⁶

Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan di Kutaraja tanggal 11 Juli 1932. Pendirian cabangnya di Aceh diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat Aceh sendiri dengan mendapat dukungan dari beberapa orang terpelajar yang berasal dari luar daerah. Untuk ini jauh sebelumnya telah dibentuk panitia pendirinya yang terdiri dari: Teuku Hasan Glumpang Payong (Teuku Hasan Dik) sebagai ketua, Teuku Nyak Arief sebagai wakil ketua, sebagai sekretaris ialah Pohan dari Tapanuli, sedang anggota-anggotanya A. Aziz (Padang), Paman Ras Martin (Ambon) dan lain-lain. Panitia segera mengirim utusannya, T.M. Usman El Muhammady, ke Yogyakarta menemui Ki Hajar Dewantara, memohon agar Taman Siswa membuka cabangnya di Aceh. Berdasarkan permohonan tokoh-tokoh masyarakat tersebut, Majelis Luhur Taman Siswa mengirimkan tiga orang gurunya ke Aceh, yaitu Ki Soewondo Kartoprojo beserta istri (yang bertugas juga sebagai guru) dan Soetikno Padmosoemarto. Dengan bermodalkan semangat dan kesadaran nasional yang tinggi

²⁶ *Ibid.*

ketiga tokoh Taman Siswa ini berangkat ke Aceh yang sebenarnya masing-masing belum mengenal tentang seluk beluk masyarakat dan adat istiadatnya pada waktu itu. Hal ini tidak terlepas dari usaha pemerintah kolonial Belanda untuk menakuti setiap orang yang masuk ke Aceh. Akan tetapi, setelah mereka tinggal di Aceh, apa yang ditakutkan bahwa orang Aceh membenci setiap orang luar, ternyata tidak benar sama sekali. Berkat pembinaan yang tekun dari mereka, dalam waktu yang relatif singkat panitia telah berhasil membuka 4 buah sekolah Taman Siswa di Kutaraja, yaitu sebuah Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara dan Taman Dewasa.

Sementara itu pada tanggal 12 Mei 1932 dengan mengambil tempat Kantor Uleebalang Kaway XVI Meulaboh telah diadakan rapat dalam rangka pembentukan cabang Taman Siswa. Rapat ini dihadiri oleh sekitar 150 orang dan pengambil inisiatifnya ialah uleebalangnya sendiri, Teuku Chiek Mohammad Ali Akbar serta calon penggantinya Teuku R. Neh. Di daerah ini juga selama dua tahun (sampai Tahun 1934) telah berhasil dibuka 4 buah sekolah, serupa dengan di Kutaraja, yaitu: Taman Anak, Taman Muda, Taman Antara dan Taman Dewasa.

Pada akhir bulan Juli 1932 di Sabang telah direncanakan untuk mendirikan cabang Taman Siswa; sebagai pengambil inisiatifnya ialah: Teuku Abbas, uleebalang Sabang dan dr. Latumeeten, yang berasal dari Ambon dan bekerja sebagai Kepala Rumah Sakit Jiwa Sabang. Pendiariannya baru dapat dilakukan dalam bulan

September 1932 dan pada tahun berikutnya berhasil dibuka dua buah sekolah yaitu Taman Anak dan Taman Muda di bawah pimpinan Soewandi dan Jakob.

Sebagai daerah terakhir yang berhasil dimasuki Taman Siswa pada waktu itu ialah Jeunib, sebuah daerah *uleebalang cut* yang termasuk dalam wilayah daerah Uleebalang Samalanga di Aceh Utara. Teuku Ahmad, adik Teuku Chiek Samalanga yang ditempatkan sebagai *Uleebalang Cut* di Jeuniib, pada tahun 1935 mendirikan cabang Taman Siswa dan berhasil membuka dua buah sekolah, yaitu Taman Anak dan Taman Muda di bawah pimpinan Moedhani. Dalam perkembangan selanjutnya Taman Siswa Jeunib kemudian dipindahkan ke Bireun.²⁷

Selain itu, berdiri pula sebuah Organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), yang dari hasil keputusan musyawarah ulama seluruh Aceh yang diadakan pada tanggal 5-8 Mei 1939, bertepatan dengan hari peringatan lahirnya (maulid) Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal 1358 H, di Kampus Madrasah Almuslim Peusangan, Matang Glupang Dua (*Onderafdeeling* Bireun, Aceh Utara). Sebagai pengambil inisiatifnya ialah Teungku Abdur Rahman Meunasah Meucap dan Teungku Ismail Yacob dengan mendapat restu dan perlindungan dari Teuku Chiek Muhammad Johan Alamsyah, *uleebalang* Peusangan.

²⁷Rusdi Sufi. *op.cit.* hlm. 54-55

BAB 3

DINAMIKA PERSATUAN ULAMA SELURUH ACEH DARI MASA KE MASA

A. Dinamika Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)

1. Masa Kolonial Belanda

Perang Aceh dikenal sebagai perang terlama dalam mengusir penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam catatan sejarah perang Aceh dimulai pada tanggal 26 Maret 1873 dengan ultimatum *Nieuwenhuyzen* kepada Sulthan Aceh, meskipun Sulthan Aceh telah menyatakan tidak menghendaki peperangan, tetapi juga tidak mau mengakui kekuasaan Belanda di daerah Aceh.

Secara resmi perang Aceh berakhir pada tahun 1903, sesudah berlangsung selama 30 tahun dengan ditandai tertangkapnya Sultan Aceh di Sigli pada tanggal 10 Januari 1903. Namun demikian sesungguhnya perang gerilya berskala kecil masih berjalan terus menerus hingga tahun

1926.¹ Oleh karena itu, praktis sampai tahun 1926 Aceh tidak sempat membangun lahir batin terutama pendidikan, karena sibuk dengan perang secara gerilya. Selama itu anak-anak Aceh tidak mendapat pendidikan yang cukup memadai. Pada masa itu sekolah umum yang ada hanya khusus untuk orang-orang Belanda dan sebagian kecil putera-putera *uleebalang* yang sudah menanda tangani *Kortewerkklaring* dengan Belanda.² Masyarakat awam dilarang bersekolah ditempat tersebut. Larangan tersebut bukan hanya berasal dari pemerintah Belanda tetapi juga datang dari kaum ulama pada masa itu. Mereka berpendapat bahwa pendidikan cara Belanda adalah haram. Oleh karena itu, masyarakat awam di Aceh pada saat itu hanya mendapat pendidikan melalui dayah-dayah yang banyak tersebar di setiap pelosok Aceh. Dalam dayah diajarkan berbagai ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Menurut M. Isa Sulaiman unsur terpenting yang membentuk dayah di Aceh adalah ulama (*teungku*), siswa (*murib*), pondok (*ranggang*) balai, dan kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama bermazhab syafii (*kitab Kuneng*).³

Komunitas pendatang yang pada masa itu banyak bermukim di kota dan pusat perkebunan atau pertambangan di Aceh memberikan warna tersendiri bagi

¹ Ismuha, *Lahirnya* "Persatuan Ulama Seluruh Aceh" 30 tahun yang lalu, *Buletin Darussalam* No. 14 Juni 1969, Banda Aceh, hlm. 43.

² *Ibid* hlm 44.

³ M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 32.

kehidupan bermasyarakat pada saat itu. Walaupun mereka telah lama tinggal di Aceh, namun orientasi hidup mereka masih berpaling dengan dunia luar (luar Aceh). Artinya mata mereka selalu tertuju kepada berbagai perkembangan yang sedang terjadi di luar Aceh baik dalam wilayah nusantara maupun di belahan bumi yang lain. Dengan demikian berbagai kejadian yang ada di luar Aceh di jadikan referensi bagi diri dan keluarga ataupun kelompoknya dalam menjalani kehidupan termasuk dalam sikap keagamaan dan pendidikan agama.

Ketika bangsa Indonesia mulai bangkit secara intelektual melawan penjajahan Belanda dengan ditandai berdirinya Budi Utomo, banyak organisasi-organisasi baik politik, agama, maupun pendidikan mendirikan cabang di berbagai daerah termasuk Aceh. Kaum pendatang yang memiliki mobilitas dan jaringan yang cukup tinggi di Aceh dijadikan agent pembentukan oleh beberapa organisasi dalam mengembangkan sayapnya di Aceh seperti Serikat Islam pada tahun 1916 mendirikan rantingnya di Kutaraja dengan Hassanuddin (pendatang asal Minangkabau) sebagai komisar.⁴

Sejalan dengan bangkitnya rasa kebersamaan dan kepedulian akan bangsa, beberapa tokoh di Indonesia pada saat itu juga memikirkan nasib pendidikan bagi rakyat kebanyakan. Mereka beranggapan bahwa pendidikan merupakan modal bagi perjuangan kemerdekaan. Oleh sebab itu muncullah berbagai organisasi pergerakan di

⁴ *Ibid*, hlm 36.

bidang pendidikan seperti Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara atau Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan yang lebih banyak bergerak dibidang keagamaan dan pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mengembangkan sayapnya ke seluruh penjuru tanah air berbagai organisasi tersebut membuka cabangnya ke berbagai daerah termasuk Aceh. Pada tahun 1920-an barulah secara sistematis didirikan cabang-cabang madrasah yang dimulai oleh *Madrasah Sumatera Thawalib* di beberapa daerah di Aceh terutama daerah yang masyarakatnya mempunyai hubungan tradisional dengan Sumatera Barat seperti Tapaktuan, Labuhan Haji, Meulaboh dan Sinabang. Madrasah-madrasah tersebut persis meniru Madrasah induknya di Sumatera Barat dengan guru-gurunya di datangkan dari sana seperti H. Jalaluddin Thaib, H. Syuib Baharudin. Demikian pula perserikatan Muhammadiyah yang telah menapak di Aceh tahun 1923 serta mendirikan madrasah di seluruh cabang di Aceh (seperti Kutaraja, Sigli, Bireun, Takengon, dan Langsa)⁵.

Pada fase berikutnya, pemimpin dan ulama Aceh yang telah mengubah pandangannya terhadap kelembagaan pendidikan Islam ikut ambil bagian pula dalam membangun madrasah. Twk Raja Keumala (mangkat 1930) dan Twk Abdul Azis, dua kerabat sultan yang tergolong cukup alim, pada tahun 1923 membangun sebuah madrasah bernama *Al Khairiyah* di kompleks Mesjid

⁵ *Ibid*, hlm 37

Raya Kutaraja. Madrasah itu dipercayakan kepada Tgk Syekh Saman, Siron (mangkat 1972) sebagai pimpinan.

Beberapa orang ulama di Aceh Besar lainnya lambat laun mengikuti pula jejak yang dirintis tersebut. Tgk. A. Wahab Seulimeum (1898-1966) dan Tgk. Syekh Ibrahim Lamnga mengambil prakarsa dalam pembentukar madrasah. Pertama oleh keduanya didirikan madrasah bernama *Najdiyah* (kemudian berubah menjadi *Perguruan Islam*). Kemudian yang kedua bersama *uleebalang* Montasik, T. Main mereka bertiga membangun sebuah perguruan bernama *Jadam* (Jamiah Diniyah Al Montasiah) pada tahun 1930. Untuk memimpin madrasah itu mereka mempercayakan kepada H. Muhammad Arief, perantau asal Minangkabau lulusan Darul Ulum Kairo. Dua ulama bersaudara lainnya yaitu Tgk Hasballah Indrapuri dan Tgk Abdullah Umar Lam U membangun pula beberapa madrasah seperti *Madrasah Hasbiyah* di Indrapuri tahun 1927, *Madrasah Diniyah* di Lamjampok. Madrasah-madrasah tersebut juga mempekerjakan guru-guru yang telah memperoleh pendidikan di luar daerah Aceh.

Di daerah Pidie ulama yang mengubah pandangan terhadap sekolah agama adalah Tgk M Daud Beureueh yang dibantu oleh temannya Tgk H. Abdullah Ujong Rimba membangun sebuah madrasah yang bernama *Jamiatuddiniyah* di Peukan Pidie, Sigli. Berkat bantuan yang diperoleh dari *uleebalang* 5 Mukim Pineung, T. Bentara H Ibrahim, pada tahun 1931 dibangun sebuah madrasah bernama *Madrasah As Sa'adah Al Abadiyah* di Blang Paseh Sigli. Karena Tgk M. Daud Beureueh yang hanya

berpendidikan pesantren (dayah), maka beliau mempekerjakan beberapa guru muda yang telah mendapat pendidikan di berbagai madrasah modern di luar Aceh.⁶

Dengan adanya doktrin Islam yang mengharuskan setiap orang tua mendidik anaknya secara Islami dan pandangan masyarakat Aceh pada saat itu bahwa sekolah umum merupakan sekolah orang kafir, maka keberadaan madrasah-madrasah modern mendapat tempat dihati masyarakat Aceh.

Banyaknya madrasah yang bermunculan pada saat itu tentunya membawa dampak bagi kehidupan beragama masyarakat Aceh terutama tentang ajaran Islam terutama dalam merubah pandangan masyarakat Aceh tentang aktivitas-aktivitas kehidupan yang masih mempraktekkan ajaran-ajaran lama. Selain itu juga dengan adanya madrasah-madrasah tersebut timbul suatu persaingan di antara para ulama terutama mereka yang berpaham tradisional dengan mereka yang berpaham pembaharu. Persaingan tersebut pada akhirnya merembet pada persoalan praktek keagamaan yang bersifat khilafiah. Persoalan tersebut tentunya menimbulkan kekhawatiran pada beberapa ulama Aceh diantaranya Tgk M. Daud Beureueh. Atas dasar pemikiran tersebut timbul kesadaran akan adanya sebuah wadah perjuangan yang dapat menyatukan para ulama di Aceh.

Tgk. Abd Rahman Meunasah Meujtap, salah satu ulama terkenal di daerah Peusangan yang memiliki

⁶ Isa Sulaiman, *Ibid.* hlm 40.

Madrasah "Al-Muslim Peusangan", mengambil inisiatif untuk mempersatukan para ulama-ulama di Aceh ke dalam suatu wadah. Untuk mewujudkan maksudnya tersebut, beliau terlebih dahulu melemparkan idenya pada kawan-kawannya para ulama di Peusangan. Kemudian kepada ulama-ulama se kawedanan Bireuen, setelah itu berlanjut ke para ulama se Aceh Utara dan pada akhirnya ke seluruh ulama di Aceh yang dapat beliau jumpai. Semua ulama yang ia minta pendapatnya sangat setuju dan sependapat dengan gagasannya. Dengan keyakinan bahwa seluruh ulama Aceh menghendaki persatuan diantara sesamanya, maka beliau mencari waktu yang tepat untuk mengumpulkan seluruh ulama di Aceh. Hari besar Maulid Nabi yang jatuh pada tanggal 12 Rai'ul Awal 1358 H atau bertepatan dengan tanggal 5 Mei 1937 dijadikan sebagai hari berkumpulnya para ulama di Aceh.

Pada hari tersebut selain merayakan Maulid Nabi, mereka juga membicarakan suatu wadah bagi ulama-ulama Aceh. Maka setelah melakukan berbagai pertemuan terbentuklah sebuah organisasi yang bernama "Persatuan Ulama Seluruh Aceh" (PUSA). Untuk pertama kali pengurus besarnya pada waktu itu bernama *Hoofd Bestuur*, terdiri dari :

Ketua I : Tgk. M. Daud Beureueh

Ketua II : Tgk. Abd. Rahaman Meunasah Meutjap

Setia Usaha I : Tgk. M. Nur. el Ibrahimy

Setia Usaha II : Tgk Ismail Jakub

Bendahara : T.M Amin

Kommissarissen:

Tgk. Abd. Wahab Keunalo Seulimeum

Tgk. Sjah Hadji Abdul Hamid Samalanga

Tgk. Usman Lampoh Awe

Tgk Jahja Baden Peudada

Tgk Mahmud Simpang Ulim

Tgk Ahmad Damanhuri Takengon

Tgk. Usman Aziz.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maka *Hoofd Bestuur* PUSA berkedudukan di Sigli karena Ketua I Tgk M Daud Beureueh dan Sekretaris I Tgk M Nur El Ibrahimy bertempat tinggal di Sigli.⁷

Salah satu agenda utama dari PUSA pada saat pertama pendiriannya adalah menyatukan kurikulum pengajaran di madrasah-madrasah yang sudah demikian banyaknya pada saat itu. Untuk itu diperlukan guru-guru yang sama pengetahuan dan pendidikannya. Padahal pada masa tersebut belum ada sekolah pendidikan guru. Oleh sebab itu diputuskan membangun sekolah guru yang dapat mencetak tenaga guru yang dibutuhkan. Guru-guru yang dimaksud bukan hanya pandai dalam ilmu agama tetapi juga menguasai pengetahuan umum sebagaimana yang diajarkan pada sekolah-sekolah umum.

⁷Ismuha, "Mengenang Kembali, Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Atjeh, 30 tahun yang lalu", Bagian I, *Buletin arussalam*, No 14 Juni 1969. hlm. 43-45.

Atas kesepakatan bersama dibangunlah sekolah yang diberi nama *Normal Institut* atau *Perguruan Normal Islam*. Sebagai pimpinan sekolah tersebut ditunjuk Tgk. M. Nur El Ibrahimy seorang ulama terkenal lulusan Universitas Al- Azhar, Kairo. Karena beliau pada saat ditunjuk sebagai pimpinan sekolah Perguruan Normal Islam menjabat Sekretaris *Hoofd Bestuur* PUSA, maka beliau meletakkan jabatannya sebagai sekretaris dan digantikan oleh T.M Amin yang tadinya memegang jabatan Bendahara pada *Hoofd Bestuur* PUSA. Sedangkan jabatan Bendahara *Hoofd Bestuur* PUSA yang kini kosong karena ditinggalkan oleh T.M Amin diisi oleh Tgk.H. Musthafa Ali. Selain pimpinan sekolah, dibentuk juga Dewan Penyantun yang diketuai oleh Tgk. Abd. Rahman Meunasah Meutjap. Sedangkan tenaga pengajar yang telah disiapkan terdiri dari dua orang yakni; Tgk. M. Nur El Ibrahimy sendiri selaku Direktur dan Pengajaran mengenai vak-vak Agama, Bahasa Arab dan Ilmu Pendidikan. Yang kedua Meneer Muhammad, tamatan R.H.S (*Recht Hoge School*) di Jakarta yang akan mengajar vak umum, Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris.

Rencana pembukaan Perguruan Normal Islam di Bireuen pada tanggal 15 Desember 1939 terpaksa ditunda karena adanya larangan dari pihak pemerintah Hindia Belanda berkenaan baru berakhirnya masa berlaku *Onderwijs-werbod* (larangan mengajar) dari pemerintah Hindia Belanda yang dikenakan pada Tgk. M. Nur El Ibrahimy pada saat beliau mengajar di Madrasah Nahdlatul Islam di Idi.

Sehubungan dengan kejadian tersebut *Hoofd Bestuur* PUSA mengadakan rapat kilat dan memutuskan mengirim utusan yang terdiri dari Ketua I *Hoofd Bestuur* PUSA Tgk. M. Daud Beureueh dan Ketua II *Hoofd Bestuur* PUSA Tgk Abd. Rahman Meunasah Meutjap untuk menghadap Asisten Residen Aceh Utara di Sigli. Setelah mendengar penjelasan dari utusan PUSA tersebut Asisten Residen Aceh Utara memberi izin dengan syarat bahwa *Zelfbestuurder Van Peusangan*, T.H.Tjhik M. Djohan Alamsyah menjamin tidak terjadi apa-apa.

Sepulang dari Sigli, kedua utusan PUSA tersebut langsung menemui *Zelfbestuurder Van Peusangan* untuk meminta jaminan yang diperlukan Asisten Residen. Setelah melakukan pembicaraan yang cukup alot, akhirnya *Zelfbestuurder Van Peusangan*, T.H. Tjhik M. Djohan Alamsyah memberikan jaminan dengan syarat kedua utusan PUSA tersebut, yakni Tgk. M. Daud Beureueh dan Tgk Abd. Rahman Meunasah Meutjap yang juga ulama terkenal turut memberi jaminan kepada *Zelfbestuurder Van Peusangan* bahwa tidak akan terjadi apa-apa dikemudian hari. Mendengar persyaratan tersebut kedua tokoh ulama PUSA tersebut langsung memberikan jaminannya.

Setelah urusan perizinan diselesaikan, maka pada tanggal 27 Desember 1939 atau 12 hari terlambat dari jadwal yang ditetapkan, Perguruan Normal Islam atau Normal Institut dibuka di Cot Meurak, Bireuen, dengan dihadiri oleh 57 orang pelajar, terdiri dari 55 orang dari

Aceh sendiri, seorang dari Minangkabau dan seorang dari Palembang.⁸

Dengan menggunakan kurikulum yang hampir mirip dengan Normal Islam yang ada di Padang dan mempekerjakan guru-guru profesional di bidangnya (seperti Ismail Yacub, T.Muhammad, R. Murdani, A.Gani Usman), serta memiliki ekstra kurikuler yang menarik banyak minat pemuda pada saat itu seperti kependuan, *Kasyaffatul Islam*, dan himpunan pelajar yang bernama *Himpia* (Himpunan Pelajar Islam Aceh) menjadikan Perguruan Normal- Islam sebagai sekolah favorit pada masanya.

Ketenaran Perguruan Normal Islam yang didirikan PUSA membawa dampak pada persepsi masyarakat Aceh terhadap PUSA. Sebagian masyarakat Aceh menganggap bahwa PUSA merupakan motor penerobos kebekuan dan kekunoan sekaligus sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh yang islami. Oleh karena itu, banyak masyarakat Aceh yang menyambut kehadiran PUSA dengan antusias. Keantusiasan masyarakat Aceh terhadap PUSA pada saat itu diwujudkan dalam pemberian gelar "Bapak Kesadaran Aceh" pada Tgk.M.Daud Beureueh.⁹

Selain mendapat pujian dari masyarakat Aceh, gerak-gerik PUSA juga mendapat kritikan dari beberapa pihak yang tidak sepaham dengan PUSA terutama

⁸ Ismuha, *Ibid.* hlm 46-47.

⁹ *Ibid.* hlm 49

berkaitan dengan tekad PUSA dalam menghapus kebathilan dan menetralsir persoalan khilafiah. Tgk.M.Saleh Iboih dan Tgk.M.Amin Jumpoih ulama tradisional di daerah Pidie secara terang-terangan kurang sependapat dengan ide pembaharuan yang dijalankan oleh PUSA pada masyarakat Aceh.

Menanggapi hal ini, beberapa pengurus PUSA merasa bahwa diperlukan suatu pertemuan yang dapat menggalang kekuatan sekaligus menyamakan persepsi berkaitan dengan langkah perjuangan PUSA. Atas dasar pemikiran tersebut diadakanlah Kongres PUSA yang pertama di Kuta Asan Sigli pada tanggal 12 s/d 16 Rabi'ul Awal 1359 bertepatan dengan 20 s/d 24 April 1940. Untuk memeriahkan kongres, panitia mengundang masyarakat luas baik dari dalam wilayah Aceh sendiri maupun luar Aceh. Selain itu juga diselenggarakan berbagai perlombaan bagi pelajar-pelajar madrasah seluruh Aceh seperti pertandingan sepak bola, perlombaan pidato bahasa Indonesia, perlombaan pidato bahasa Arab, dan sebagainya.

Yang menarik dalam kongres ini adalah diundangnya beberapa pigur berpengaruh baik dari kalangan ulama modernis seperti Mahmud Yunus dan Rangkyo Rahmah Elyunusiah maupun dari kalangan masyarakat Aceh untuk ikut memberikan saran kepada anggota kongres. Tgk. M. Hasan Glumpang Payong yang mewakili *uleebalang* di daerah Pidie dalam prasarannya menyatakan kesediaan *uleebalang* memberikan ke lapangan

kepada PUSA untuk bergerak asal saja menempuh jalan yang baik dan jangan bertikai.

Mr. S.M. Amin dan Mr.T.M. Hanafiah memberikan penilaian kritis terhadap sistem sosial mayarakat Aceh agar dijadikan bahan pertimbangan program PUSA. Dalam pidatonya yang berjudul "Hubungan Syarak, Wet dan Adat", S.M. Amin secara tegas menyerukan agar diubah sistem pengadilan di Aceh yang bersandarkan adat. Adat yang telah lampau menurut S.M.Amin tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pencariannya. Sedangkan Mr.T.M. Hanafiah dalam prasarannya yang berjudul "Kemiskinan Rakyat Aceh dan cara Mengatasinya" memaparkan betapa rendahnya pendapatan petani Aceh yang disebabkan rendahnya produktivitas mereka disamping berbagai kewajiban adat dan sosial yang dibebankan kepada mereka. Oleh karena ia menghimbau agar dicari pemecahannya secara bersama-sama, baik oleh masyarakat maupun hulubalang.¹⁰ Hasil dari kongres PUSA diantaranya adalah :

1. Membentuk Pemuda PUSA sebagai tenaga penjebol dan calon pengganti ulama-ulama yang sudah lanjut usia.
2. Membentuk Muslimat PUSA supaya perjuangan seimbang.
3. Membentuk bagian penyiaran PUSA dan menerbitkan majalah.

¹⁰ Isa Sulaiman, *op.cit*, hlm 51.

Masing-masing badan yang baru dibentuk, langsung dipilih ketuanya masing-masing. Pemuda Pusa dipimpin oleh Tgk.Amir Husein Al-Mujahid dari Idi, Tgk. Nyak Asma (isteri Tgk.M. Daud Beureueh) menjadi ketua Muslimat PUSA, Tgk Ismail Yakub terpilih sebagai Ketua bagian penerangan dan penyiaran PUSA yang juga membawahi penerbitan majalah PUSA.¹¹

Di samping mendirikan *onderbouwnya* PUSA juga membentuk *Majelis Tanfiziyah Syariah* yang diketuai oleh Tgk.H.A. Hasballah Indrapuri dan Tgk. A. Wahab Seulimeum. Organisasi ini bertujuan untuk menangani hukum keagamaan.¹²

Semenjak kongres I, perkembangan PUSA semakin pesat. PUSA menjelma sebagai gerakan yang PUSA kendalanya berada di daerah Indrapuri/Seulimeum (Aceh Besar), Sigli (Pidie), Bireuen (Aceh Utara), dan Idi (Aceh Timur). Di samping itu, sifat organisasi sudah tidak lagi elitis dan eksklusif ulama saja melainkan mencakup seluruh komponen masyarakat Aceh di bawah kebesaran Islam. Oleh karena itu, banyak masyarakat Aceh yang bergabung ke PUSA, baik dalam PUSA sendiri maupun *onderbouwnya*. Akhir tahun 1940 tercatat seluruh pemuda Aceh masuk ke dalam Pemuda PUSA, 99% ulama Aceh adalah anggota

¹¹Ismuha, "Mengenang Kembali, Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Atjeh, 30 tahun yang lalu", Bagian II, *Darussalam*, No 15 Juli 1969, hlm 34.

¹² Isa Sulaiman, *op.cit*, hlm 52.

PUSA, sedangkan lebih dari 90% perempuan Aceh masuk bergabung ke dalam Muslimat PUSA.¹³

Bergabungnya seluruh komponen masyarakat baik dari golongan ulama, *uleebalang*, guru, maupun rakyat biasa, menambah kekuatan PUSA untuk mendobrak tradisi yang ada dalam masyarakat yang melenceng dari ajaran Islam. "Kewajiban dalam Islam adalah suruh makruf dan tegah mungkar" pesan Tgk. Abdullah Umar Lam U dalam Kongres PUSA tahun 1940, sementara Tgk. M. Daud Beureueh dalam pembentukan cabang PUSA Langsa tanggal 24 Maret 1940 secara tegas menyatakan maksud PUSA untuk membasmi iktikad yang batil dalam agama yang sangat merusak rakyat Aceh. Pernyataan kedua ulama PUSA itu secara jelas memperlihatkan cita-cita dari organisasi tersebut yaitu ingin membentuk masyarakat Aceh yang lebih berwajah Islami. Atau dengan kata lain menurut T.M Amin dan Hasan Saleh, PUSA memikul beban suci, dalam memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk tahyul dan kurafat.¹⁴ Dengan sikap seperti ini, sudah dipastikan PUSA berhadapan langsung dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang merasa diserang oleh PUSA diantaranya adalah ulama-ulama tradisional dan *uleebalang*.

Hubungan sosial PUSA dengan *uleebalang* dapat dikatakan selalu diwarnai dengan konflik. Banyak tokoh-tokoh muda PUSA yang enerjik menyerang berbagai

¹³ Ismuha, *op. cit*, hlm. 34.

¹⁴ Isa Sulaiman, *op.cit*, hlm. 55-56.

kebijaksanaan para *uleebalang* yang dianggap menyengsarakan rakyat. Bidang tugas *uleebalang* yang menjadi pemicu konflik adalah pengerahan rodi (kerja wajib bagi setiap lelaki berusia 18-55 tahun untuk proyek-proyek umum selama 12 hari dalam setahun) dan penarikan *belasting* (pajak harta yang oleh penduduk sering disebut "pajak kepala", karena semiskin-miskinnya penduduk tetap harus membayar f 1, per penduduk dewasa).

Sumber lain yang menjadi pemicu konflik dengan *uleebalang* adalah pengelolaan *baitul mal* (harta milik umum). Sebagian *uleebalang* memang bersikap transparan dalam mengurus *baital mal* seperti *sagi XXII mukim*, namun banyak *uleebalang* yang mengurus *baitul mal* sangat tidak transparan.

Selain dengan *uleebalang*, PUSA juga menemui konflik dengan ulama-ulama tradisional sebagaimana yang telah diceritakan di atas. Usaha memurnikan Islam yang dilakukan oleh PUSA menimbulkan konflik dengan ulama-ulama tradisional dan pemimpin-pemimpin tarekat di Aceh. Di satu sisi-sisi ulama pembaharu yang tergabung dalam PUSA berusaha secara tegas memberantas takhyul dan kurafat yang ada pada masyarakat Aceh. Sedangkan di sisi lain, ulama tradisional masih mengakomodir tradisi-tradisi lokal yang diamalkan oleh umat Islam di Aceh seperti pemujaan kuburan keramat, upacara tolak bala yang dalam kaca mata ulama pembaharu dianggap mengotori ajaran Islam. Selain itu juga ulama-ulama pembaharu ini menggugat praktek-praktek agama yang bersifat khilafiah

Hal ini tentunya mendapat tanggapan dari ulama-ulama tradisional yang selama ini mempraktekannya. Tentangan dari ulama tradisional merupakan sebuah reaksi yang wajar.

Pada hari ulang tahunnya yang kedua tanggal 12 Rabi'ul awal 1360 bertepatan dengan tanggal 9 April 1941. PUSA bersama Pemuda PUSA dan Muslimat PUSA mengadakan konferensinya yang pertama di Langsa (Aceh Timur).

Pada tahun 1942 PUSA dan Pemuda PUSA tidak sempat mengadakan kegiatan apa-apa karena sibuk dengan menyambut kedatangan Dai Nippon yang dianggap akan membebaskan bangsa Asia dari cengkraman penjajahan Belanda. Janji Dai Nippon yang akan membebaskan Indonesia yang dianggap sebagai saudara tua dari penjajahan Belanda sangat merasuk ke dalam sanubari masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Aceh.

Dengan panjangnya masa peperangan dengan Belanda, menanamkan rasa dendam yang cukup mendalam bagi rakyat Aceh. Kedatangan Dai Nippon dengan janji-janji surga tersebut tentunya mendapat sambutan yang cukup hangat dari masyarakat termasuk para ulama dan Pemuda yang tergabung dalam PUSA dan Pemuda PUSA.

Untuk menyambut kedatangan Bala tentara Dai Nippon ke bumi Aceh, para pemuda sudah terlebih dahulu berusaha keras menghalau Belanda dan serdadu-serdadunya dari *Groot Aceh* dan Aceh Utara, dengan jalan melakukan pembunuhan terhadap kepala eksploitasi ASS (*Atjeh Staat Spoorwegen*) di Banda Aceh (dahulu Kutaraja),

Controleur di Seulimeum dan Asisten Residen di Sigli yang semuanya adalah orang Belanda. Sesudah kejadian ini yang lainnya semua lari meninggalkan Kutaraja, Seulimeum, Lammeulo, Meureudu, Samalanga dan Bireuen, dan lari ke arah Takengon (Aceh Tengah).

Waktu Jepang mendarat di Ujung Batee, Krueng Raya, Jepang sudah tidak menjumpai lagi seorang musuhpun, karena sudah lebih dahulu lari dengan niat akan bertahan di Takengon. Ketika Pasukan Jepang telah mencapai Takengon, pihak Belanda langsung menyerah karena telah patah semangat melihat pemuda-pemuda Aceh sudah seluruhnya memihak Jepang.¹⁵

2. Masa Penjajahan Jepang

Kemenangan Jepang terhadap Rusia merubah peta kekuatan penguasaan kolonialisme di Asia. Serangan kilat yang dilancarkan Jepang ke Malaya menghasilkan jatuhnya Penang ke tangan mereka pada tanggal 19 Desember 1941. Jepang memanfaatkan Penang sebagai markas propaganda terutama dalam mempersiapkan pendaratan Jepang ke Indonesia.

Mendengar keberhasilan Jepang mengalahkan bangsa Eropa, membuat sebahagian tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia terbuka, apalagi ditambah dengan janji Jepang untuk membebaskan Indonesia yang dianggap sebagai saudara tua Jepang dari penjajah kolonial Belanda.

¹⁵ Ismuha, *Ibid*, hlm. 36-37.

Banyak keputusan yang dikirim ke Penang untuk menemui Jepang baik atas prakarsa perorangan maupun organisasi. PUSA sebagai salah satu organisasi umat Islam terbesar di Aceh pada saat itu juga mengirim utusannya menemui petinggi Jepang di Penang. Salah satu utusan tersebut adalah Said Abu Bakar. Said Abu Bakar bersama tiga orang lainnya dari PUSA pada tanggal 31 Desember 1941 berhasil menemukan Mayor Fujiwara yang mempunyai misi khusus membina kolone kelima F Kikan (Fujiwara Kikan) di Taiping.¹⁶

Dari pertemuan tersebut Fujiwara menugaskan Said Abu Bakar untuk merekrut beberapa para perantau di Sumatera, terutama Aceh untuk bergabung ke dalam kolone kelima. Setelah terkumpul anggotanya, mereka diberikan pelatihan dan kursus kilat sebagai agen rahasia dibawah bimbingan Masabuchi Sahei. Selama kursus kilat berlangsung mereka saling memberi informasi sambil membina hubungan baik. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Said Abu Bakar untuk meyakinkan Mayor Fujiwara bahwa PUSA adalah organisasi Islam yang terbesar di Aceh seraya meminta kesediaannya memberi konsesi-konsesi kepada agama Islam apabila kelak misi yang dia laksanakan berhasil. Sebaliknya, Mayor Fujiwara bersedia akan memenuhi permintaan tersebut, disamping memberi instruksi kepada Said Abu Bakar guna mendukung pendaratan Jepang di Aceh. Adapun instruksi-instruksi tersebut diantaranya adalah menyebarkan propaganda tentang kehebatan pasukan Jepang,

¹⁶ Isa Sulaiman, *Ibid.* Hlm. 75.

permintaan kepada rakyat Aceh untuk bekerja sama dengan Jepang.

Setelah memperoleh cukup latihan, Mayor Fujiwara dan Masubuchi Sahei melepas anggota kolone kelima untuk bertolak ke Sumatera. Dengan menyamar sebagai pengungsi, mereka mendarat di dua lokasi, yakni di Sungai Sembilan Asahan dan Bagan Siapi-api. Sesampainya di darat mereka tidak dapat melanjutkan perjalanannya ke daerah masing-masing karena tertangkap oleh polisi dan ditahan di Medan. Selama berada dalam tahanan polisi, Said Abu Bakar rupanya mengirim sepucuk surat kepada kawannya Ali Hasjmy, yang waktu itu guru Madrasah Perguruan Islam Seulimeum dan aktivis pemuda PUSA. Mendapat kabar tentang penahanan Said Abu Bakar (yang merupakan bekas guru di Perguruan Islam Seulimeum), Tgk. A.Wahab Seulimeum sebagai pimpinan mengirim Ahmad Abdullah untuk menemui Said Abu Bakar di tahanan. Ternyata selain melakukan kontak dengan Ali Hasjmy, Said Abu Bakar juga mengontak T.H Zainul Abidin yang merupakan rekan seperjuangannya di Samalanga. Sebelum berangkat ke Medan, Ahmad Abdullah dan T.H Zainul Abidin terlebih dahulu menemui T. Ahmad Daru (*uleebalang* Jeunieb) untuk menyampaikan niatnya menemui Said Abu Bakar di Medan. Sewaktu di Medan, ternyata hanya Ahmad Abdullah saja yang dapat berjumpa dengan Said Abu Bakar dan kemudian menerima pesan dari Jepang yang dibawanya.

Begitu memperoleh pesan Ahmad Abdullah dan T.H Zainul Abidin bergegas pulang ke Jeunieb, Samalanga,

untuk menyampaikan kepada T. Ahmad Danu. Kemudian T. Ahmad Danu meminta Ahmad Abdullah menyampaikan pesan yang diterima dari Said Abu Bakar pada T.Nyak Arif (*uleebalang* berpengaruh saat itu di Kutaraja) dan Tgk. M.Daud Beureueh (Ketua PUSA) serta Tgk.A.Wahab Seulimeum. Pesan yang dibawa Ahmad Abdullah yang berisikan membentuk kolene kelima F.Kikan itu, nampaknya mempengaruhi T. Nyak Arif maupun Tgk. M.Daud Beureueh. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pertemuan rahasi di rumah T.Nyak Arif di kawasan Lam Yong. Pertemuan yang dihadiri oleh T.M.Ali Panglima Polem, Tgk. Daud Beureueh, Tgk. A.Wahab Seulimeum, Tgk. Syek Ibrahim, T.Ahmad Jeunieb, Ahmad Abdullah dan tuan rumah sendiri menyepakati untuk menggerakkan kolene kelima di Aceh dalam rangka menyambut kedatangan Jepang.¹⁷

Pergerakan rahasia kolene kelima F. Kikan di Aceh mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kemajuan tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor pendukung diantaranya adalah keterlibatan tokoh-tokoh *uleebalang* seperti T. Nyak Arif dan T. M. Ali Panglima Polem menjadikan gerakan ini dapat diterima oleh sebagian penguasa daerah (*uleebalang*). T. Nyak Arif dan T. M.Ali Panglima Polem memanfaatkan jaring kekerabatan dalam merekrut para *uleebalang*. Keterlibatan tokoh-tokoh ulama yang juga ketua PUSA, Tgk M. Daud Beureueh dan Tgk A.Wahab Seulimeum yang memanfaatkan jaringan PUSA

¹⁷ *Ibid*, hlm 75.

untuk mengembangkan gerakan ini ke seluruh penjuru Aceh. Selain itu juga adanya kenyataan akan ketidakberdayaan pasukan Belanda terhadap aksi pasukan Jepang yang memamerkan kekuatannya di Kutaraja. Hal ini dapat dilihat dengan leluasanya pesawat-pesawat Jepang terbang meraung-raung di atas Kutaraja dan secara berturut-turut menjatuhkan bom di Sabang dan Ulee Lheue pada tanggal 16 dan 22 Januari.¹⁸

Melihat kemerosotan moral pasukan Belanda dalam menghadapi serbuan tentara Dai Nippon, para propagandis F. Kikan menangkap peluang ini dengan melancarkan propaganda ke seluruh pelosok Aceh. Banyak dari para propagandis ini meyakinkan pada penduduk Aceh bahwa sesaat lagi akan datang kemerdekaan atau kehidupan yang lebih baik di bawah penguasa baru yakni Dai Nippon. Apabila saat itu tiba, maka kewajiban rodi dan *belasting* akan dihapus oleh penguasa baru.

Melihat situasi yang menguntungkan, para pendukung F. Kikan di Aceh mengatur siasat guna menyerang Belanda. Pada tanggal 19 Februari 1942 dimulailah tindakan sabotase berupa pemutusan kawat-kawat telepon, telegraf, dan pembongkaran rel-rel kereta api di daerah Seulimeun. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1942 diselenggarakan rapat umum yang diisi oleh pidato dari tokoh-tokoh masyarakat Seulimeum diantaranya adalah Tgk. A.Wahab Seulimeum (Pemimpin Perguruan Islam seulimeum/tokoh PUSA), T.M.A.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 78.

Panglima Polem (Panglima Sagi XXII Mukim), dan T. Dolah (*uleebalang* Seulimeum). Dalam rapat umum tersebut dikobarkan semangat jihad dalam mengusir penjajah. Pada tanggal 23 Februari malam setelah rapat umum rakyat bergerak melakukan pemberontakan pada Belanda dengan menyerang konsentrasi-konsentrasi pasukan Belanda di Seulimeum. Hasilnya, Kontelir Belanda, Tiggelman, mati dibunuh dan sejumlah 5.000 Gulden disita dari kantor pos setempat. Besoknya, Graaf Von Sperling, pejabat tertinggi kereta api Aceh juga mati dibunuh ketika memeriksa kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan di jembatan Keumiroe, dekat Seulimeum. Dalam pemberontakan tersebut terdapat tiga orang Aceh meninggal dengan memakai ban lengan berlambang huruf "F", lambang dari pemberontakan itu.¹⁹

Keesokan harinya satu kesatuan pasukan Marsose di bawah pimpinan Mayor Palmer Van Den Broek dikirim ke Seulimeum untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di sana. Walaupun keadaan mulai reda dari tindakan-tindakan sabotase, kedatangan bala bantuan tersebut tidak membawa perubahan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan karena surutnya wibawa pasukan Belanda di mata rakyat Aceh. Bahkan dengan tindakan balasan yang dilancarkan oleh pasukan marsose tersebut semakin memperkokoh tekad rakyat Aceh mengusir Belanda.

¹⁹ Piekar, dalam Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.151.

Lemahnya wibawa Belanda dan keberhasilan F.Kikan di Seulimeum melakukan pemberontakan, menjadi inspirasi bagi sel-sel F.Kikan di seluruh Aceh untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda.

Tanggal 4 Maret 1942 terjadi pertemuan rahasia para tokoh-tokoh Aceh di Lubuk, Aceh Besar untuk menentukan perlawanan secara bersama-sama di seluruh Aceh. Teuku Nyak Arif mendapat mandat dari forum rapat tersebut untuk menentukan saat dimulainya pemberontakan dan mengkoordinasi strategi perlawanan di seluruh Aceh. Tanggal 7 Maret merupakan awal pergerakan tersebut melakukan aksi pemberontakan. Serangan frontal telah dilancarkan terhadap markas pasukan Belanda di Calang, pantai Barat pada tanggal 9 Maret malam. Serangan ini langsung dipimpin oleh *Uleebalang* Calang, Teuku Sabi.²⁰

Namun demikian tidak semua sel-sel F. Kikan melakukan pemberontakan dengan sukses. Di daerah Pidie yang beberapa *uleebalang*nya masih banyak yang pro Belanda mencium gelagat pemberontakan, melakukan penindasan-penindasan terhadap orang-orang yang dicurigai dengan jalan menangkap mereka. T. Pakeh Sulaiman, *uleebalang* Pidie dengan gencar mencari tempat persembunyian orang-orang yang dicurigai. Mereka berhasil menangkap T.M.Amin karena ketahuan menjadi sumber bendera-bendera "F: yang beredar di Pidie.

²⁰Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.152.

Seiring dengan pergerakan mundur pasukan Belanda menjelang pendaratan Jepang di Aceh, dari Kutaraja ke Takengon, pemberontakan F.Kikan semakin meluas. Apabila sel-sel F. Kikan yang dulunya tidak berani melakukan serangan secara terbuka, maka ketika pasukan Belanda yang terakhir meninggalkan daerahnya, mereka melakukan serangan secara terbuka. Pada malam 11-12 Maret 1942 aktivis F. Kikan di bawah pimpinan Sabcut menggerakkan massa di sekitar kota Sigli untuk menyerang rumah penjara tempat rekan-rekan mereka ditawan. Setelah itu terjadi kerusuhan massa di kota Sigli, kantor-kantor, tempat tinggal orang-orang Belanda dan toko-toko Cin menjadi sasaran amukan dan penjarahan massa. Asisten Residen Van Den Berg ikut terbunuh dalam kerusuhan tersebut.

Pemberontakan besar yang menyeluruh berlangsung hanya empat hari di Aceh Besar pada bulan April itu, dan kurang dari itu sebagian besar daerah lain di Aceh. Tentara Jepang mendarat pada 12 Maret dekat Kutaraja dan Peureulak (Aceh timur). Mereka menguasai kota-kota penting di Aceh dalam satu hari yang sama dengan runtuhnya rezim Belanda, disambut meriah oleh penduduk.²¹ Banyak pemimpin PUSA seperti Tgk. Daud Beureueh, Said Abu Bakar, Tgk.A.Husin Al Mujahid dan Ali Hasjmy bergabung dengan pasukan Jepang dalam menegakkan ketertiban dan keamanan. Masabuchi Sahei yang ikut dalam pasukan yang mendarat itu segera

²¹ Anthony Reid, *ibid*, hlm154.

menghimpun rekan-rekan setianya aktivis F. Kikan untuk meminta jasa mereka dalam mengendalikan kekuasaan yang sedang vakum.²²

Perubahan peralihan kekuasaan membuat panik para lawan-lawan politik aktivis PUSA yang juga aktivis F. Kikan. Banyak dari mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan balas dendam dengan melaporkan *uleebalang-uleebalang* yang pernah menghalangi gerak mereka. T. Chik ali Akbar, T. Ben dan T. Polem di Meulaboh, dilaporkan kepada serdadu Jepang untuk dieksekusi.

Hari-hari transisi yang berlangsung $\pm$ 1 bulan itu benar-benar masa penantian yang cukup pahit terutama bagi *uleebalang* yang tidak ikut ambil bagian dalam gerakan F. Kikan. Ada diantara mereka yang bersembunyi seperti T. M. Daud Cumbok dan yang lainnya secara terpaksa meminta maaf dan bergabung kedalam barisan F. Kikan.²³ Keadaan ini merupakan pengalaman pahit yang tidak pernah mereka lupakan.

Harapan-harapan yang selama ini didengungkan Jepang dalam rencana membangun Asia Timur Raya ternyata tidak menjadi kenyataan. Janji-janji yang diberikan Jepang pada sekutu-sekutunya di Indonesia dalam mengusir serdadu Belanda di Indonesia tidak menjadi kenyataan. Demikian pula yang terjadi di Aceh.

²² Isa Sulaiman, *op.cit*, hlm. 85.

²³ *Ibid*, hlm. 86.

Konsesi-konsesi yang sebelumnya telah dijanjikan Jepang pada PUSA hanyalah janji belaka. Usaha keras untuk perubahan yang dilakukan PUSA melalui Barisan F di Aceh telah ditindas dengan tegas seluruhnya. Pada tanggal 20 April Barisan F dibubarkan, dan keesokan harinya suatu pemerintahan sipil baru yang sementara telah diresmikan. Panitia-panitia penertiban umum juga dibubarkan, dan para *uleebalang* berangsur-angsur kembali diberi kekuasaan sebagai *soncho*. Yang paling banyak mempunyai pengalaman politik diantara *uleebalang* itu, diantaranya termasuk musuh-musuh besar PUSA, telah diangkat sebagai *Guncho* menggantikan kedudukan *controleur* Belanda pada setiap kecamatan.²⁴

Sementara itu kebijaksanaan tingkat tinggi Jepang yang menjamin kaum *uleebalang* sebagai korps pegawai pemerintahan yang pokok semakin meningkatkan rasa sakit hati para pemimpin dan aktivis PUSA. Bersamaan dengan kembalinya kaum *uleebalang* ke dalam lingkaran kekuasaan Jepang, para pemimpin PUSA yang penting, termasuk Tgk. M. Daud Beureueh, T. M. Amin, Tgk. A. Wahab Seulimeum, dan Husein Almujaheed dengan kasar ditangkap Kempetai, dan mendapat siksaan di penjara.²⁵

Kejadian-kejadian seperti ini menimbulkan kecurigaan PUSA pada kaum *uleebalang* sebagai biang keladi. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya surat dari para kaum *uleebalang* pada pemerintah Jepang yang

²⁴ Anthony Reid, *op.cit.*, hlm. 161.

²⁵ *Ibid.*

berisikan tuduhan mereka pada PUSA. Ternyata surat-surat tersebut mendapat tanggapan yang positif dari Jepang sehingga melancarkan berbagai tekanan terhadap segala aktivitas PUSA. Selain melakukan berbagai tekanan, Jepang juga memainkan kebijaksanaan mengurangi pengaruh PUSA di masyarakat dengan jalan mengangkat Tuanku Abdul Azis sebagai penasihat Islam. Kemudian membentuk Maibkatra (Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya) sebagai wadah kaum ulama untuk menjalankan propaganda Jepang dikalangan masyarakat Islam di Aceh dengan ketuanya Tuanku Abdul Azis. Sebagai pengurus diangkat beberapa ulama dari PUSA dan Muhammadiyah dengan komposisi berimbang. Dalam menjalankan tugasnya pengurus badan ini secara rinci telah diatur oleh penguasa Jepang diantaranya adalah menganjurkan rakyat supaya tidak campur tangan dalam urusan pemerintahan dan mengarahkan rakyat kepada amal dan perbuatan seperti yang ditentukan dalam agama Islam dengan hati yang bersih dan ikhlas.²⁶

Pengembalian kekuasaan kaum *uleebalang* oleh penguasa Jepang di Aceh membawa konsekuensi yang cukup berat bagi kaum bangsawan itu sendiri. Posisi *uleebalang* dalam jabatan barunya sebagai *Guntyo* dan *sontyo* tidak lebih sebagai mandor belaka, terutama pada saat pengerahan tenaga kerja. Perang Asia Timur Raya yang berkepanjangan memaksa Jepang untuk memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada. Daerah Aceh yang terkenal subur dan tidak pernah kekurangan bahan pangan

²⁶ *Ibid*, hlm 189.

dijadikan Jepang sebagai lumbung padi bagi penguasa Jepang yang ada di Aceh dan sekitarnya. Untuk mencapai maksud tersebut di atas Jepang mengerahkan tenaga gratis dari rakyat Aceh dengan jalan kerja gotong royong. Mereka mewajibkan setiap laki-laki di Aceh yang berbadan sehat untuk menyisihkan waktunya 14 hari dalam sebulan bergotong royong mengerjakan kepentingan pihak Jepang. Pemerasan tenaga manusia yang kejam ini tentunya menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Dengan tugasnya sebagai mandor yang mengerahkan tenaga rakyat, tentunya hal ini mempersulit posisi *uleebalang* di mata rakyatnya. Di satu pihak mereka ingin membela rakyatnya, namun di pihak lain mereka takut akan tindakan Jepang terhadap mereka. Bagi *uleebalang* yang berani menentang kebijaksanaan Jepang seperti T.M.Hasan Glumpang Panyong yang memprotes dan memperingatkan Jepang akan akibat kerja paksa terhadap hasil panen, dihukum mati oleh Kempetai pada bulan Agustus 1944.²⁷

Kesulitan kaum *uleebalang* dalam menghadapi dilema yang cukup sulit ini menjadi peluang bagi PUSA dalam mempengaruhi Jepang. Dengan mendekati petinggi-petinggi Jepang di Aceh yang memang telah lama pro pada ulama, semakin bertambah orang Jepang yang berpendapat bahwa kepercayaan harus lebih banyak diberikan pada PUSA dan F.Kikan jika Jepang ingin mendapat sokongan yang diperlukan. Kemenangan yang utama kelompok PUSA pada saat itu adalah ketika penguasa militer mencopoti kekuasaan kepolisian dan

²⁷ *Ibid*, hlm 209.

kehakiman *uleebalang* melalui pembentukan pengadilan negeri (*ku hoin*) dan pengadilan agama (*kadhi tyo*) di tiap wilayah *uleebalang* pada permulaan tahun 1944. Aoki Eigoro sebagai pejabat yang berwenang dalam urusan kehakiman kelihatan lebih banyak berkonsultasi dengan Twk. Mahmud, hakim (simpangan) *Tiho hoin* Kutaraja dan tokoh radikal lainnya seperti Said Abu Bakar.

Keberhasilan kaum ulama yang dalam hal ini PUSA mempengaruhi Jepang dan menyudutkan kaum *uleebalang* menimbulkan reaksi keras dari mereka. Konflik diantara kaum *uleebalang* dan PUSA menjadi semakin panjang. Bahkan kadang kala konflik tersebut menimbulkan bentrokan fisik. Di le Leubeu, T. Amat Asee Le putra T. R. Mat Ali dan mantan guru H.I.S Muhammadiyah sigli bersama pengikutnya melakukan tindak kekerasan mengobrak-abrik kantor pemuda PUSA setempat. Di negeri 3 *mukim* Njong, T. Makam, sepupu T. Laksamana Umør bersama pengikutnya melakukan tindak kekerasan terhadap aktivis pemuda PUSA di desa Paru yang dipimpin oleh Keuchik Ahmad dan Tgk. Harun sehingga menimbulkan perkelahian massal di antara kedua kelompok tersebut.²⁸

Pada permulaan tahun 1945, Inoe mendapat tugas baru membentuk satu badan baru yang ditujukan untuk menumpas kegiatan orang-orang yang pro sekutu. Di lain pihak komando tertinggi militer Jepang di Sumatera sedang merisaukan kekurangan pasukan untuk mempertahankan

²⁸ Isa Sulaiman, *op.cit.* hlm 109.

Sumatera dari infiltrasi sekutu dimana sebagian besar pasukan Jepang telah dikirim ke Philipina bertempur menghadapi tentara sekutu di sana. Dengan demikian, *Giyugun* terpaksa diperlakukan sebagai bagian dari pusat cadangan strategis yang dipersiap untuk mempertahankan pusat-pusat militer dari kemungkinan penyerbuan sekutu. Untuk itu mereka merekrut penduduk Indonesia sebagai tentara gerilya yang mempunyai tekad yang tidak kenal menyerah. Di Aceh, calon-calon pasukan tersebut diambil dari unsur-unsur radikal yang pernah bertindak terhadap rezim Belanda, yakni PUSA.

Kebencian masyarakat Indonesia akibat tekanan, penindasan serta perampasan dari penjajah Jepang sedikit berkurang dengan adanya janji dari Perdana Menteri Jepang pada saat itu Koiso di depan parlemen yang mengatakan akan memberikan kemerdekaan pada waktu yang akan datang. Janji-janji tersebut ternyata hanyalah janji kosong belaka, karena dibalik itu semua Jepang membutuhkan konsesi dari rakyat Indonesia untuk membantu Jepang berperang menghadapi tentara sekutu.

Pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia sadar bahwa posisi Jepang pada saat itu sedang terjepit oleh serangan-serangan yang dilancarkan tentara sekutu. Keberhasilan tentara sekutu membumi hanguskan daratan Jepang memaksa pasukan Jepang untuk bertekuk lutut. Situasi kawasan yang telah berubah dimanfaatkan oleh para pemimpin kita terutama kaum muda untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Atas desakan kaum muda, pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan M.

Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta.

Berita proklamasi Indonesia disebar oleh seluruh komponen masyarakat ke seluruh wilayah Indonesia. Terdengarnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia membangkitkan semangat bangsa ini melawan penjajahan. Seluruh komponen bangkit membentuk barisan pertahanan.

Melemahnya wibawa pemerintah kolonial Jepang yang sebelumnya dapat menjadi -penengah pertikaian antar fraksi pejuang Indonesia, menjadikan fraksi-fraksi bertikai tersebut memasang mata akan kemungkinan-kemungkinan melakukan serangan terhadap lawan politiknya. Demikian pula yang terjadi di Aceh, kaum ulama di satu sisi dan kaum *uleebalang* di sisi yang lain saling menunggu melihat kemungkinan meraih kesempatan menuju kekuasaan.

3. Masa Kemerdekaan

Sesudah proklamasi kemerdekaan PUSA sebagai organisasi masih sulit untuk menata kembali dirinya. Hal ini terjadi karena pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia posisi PUSA masih terancam oleh lawan-lawan politiknya terutama kaum *uleebalang*. Beberapa *uleebalang*, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mempersiapkan kedatangan tentara Belanda sebagaimana yang pernah dilakukan pihak PUSA pada saat menyambut bala tentara Dai Nippon. Banyak dari mereka mulai

kembali menjalin hubungan dengan mantan pejabat-pejabat Belanda yang saat itu masih ditawan Jepang di Pemantang Siantar.²⁹ Apalagi tersiar kabar bahwa tentara Belanda akan mendarat ke daratan Aceh dalam waktu dekat. Selain itu juga mereka mempersiapkan diri dengan membangun pasukan gerilya masing-masing. Senjata mereka dapatkan dengan cara merebut dari tentara Jepang.

Dengan masing-masing pihak memiliki pasukan, maka konflik antara PUSA dengan kaum *uleebalang* semakin tajam. Hal ini terjadi karena masing-masing merasa sama-sama berhak mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Puncak dari konflik tersebut adalah terjadinya revolusi sosial di Aceh yang banyak memakan korban jiwa, terutama dari pihak kaum bangsawan.

Revolusi ini bermula dari adanya perebutan kekuasaan antara pasukan milisi milik kaum *uleebalang* dengan pasukan milisi bentukan PUSA atas Kota Sigli. Namun dibalik itu semua adalah adanya keinginan masing-masing pihak untuk menguasai senjata yang ada di gudang-gudang senjata Jepang sekitar Sigli, seperti Yasinsoko Leupeum, Yasinsoko Titue, dan Yasinsoko Lingkok. Ketiga gudang ini juga menyimpan bom yang beratnya 500 Kg.

Dalam perebutan senjata ini pihak *uleebalang* dibawah pimpinan T. M. Daud Cumbok untuk beberapa waktu berhasil menguasai Kota Sigli. Sedangkan pihak PUSA menerapkan taktik mengisolasi Kota Sigli dari luar

²⁹ Anthony Reed, *op.cit*, hlm. 312.

dengan maksud memutus jalur logistik pihak lawan. Taktik ini membawa keberhasilan bagi PUSA karena tidak beberapa lama kemudian mereka berhasil menangkap pihak lawan yang berusaha menerobos penjagaan. Dengan situasi yang semakin memanas ini pihak Residen Aceh, T. Nyak Arief mengirim utusan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Salah satu utusan itu adalah Syamaun Gaharu.

Setiba di Sigli utusan tersebut memanggil kedua belah pihak untuk melakukan perundingan. Perundingan menghasilkan kesepakatan bahwa senjata yang berhasil dirampas dari pihak Jepang diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia di Kutaraja. Namun kesepakatan tersebut tidak berjalan dengan baik karena timbulnya kecurigaan dari pihak PUSA akan pelanggaran perjanjian dari pihak *uleebalang*. Menurut PUSA, pihak *uleebalang* secara diam-diam menerima 27 pucuk senjata dari T. Cut Hasan, Asisten Residen setempat. Atas kecurigaan tersebut pasukan milisi di bawah PUSA segera menyerbu Kota Sigli. Akibatnya pertempuran antar orang Aceh tidak dapat dielakkan. Peperangan ini berakhir pada tanggal 17 Januari 1946 dengan ditandai penggantian nama Lam Meulo menjadi Kota Bakti.³⁰

Setelah peperangan tersebut, pihak PUSA sebagai pemenang melakukan pembersihan terhadap lawan-lawan politiknya termasuk T. Nyak Arief yang diasingkan ke Takengon dan menahan Syamaun Gaharu. Seiring dengan

³⁰ Isa Sulaiman, *op.cit.* hlm. 208.

semakin kuatnya posisi PUSA di Aceh, maka tenaga dan pikiran pengurus PUSA mulai diarahkan kembali pada PUSA sebagai organisasi, maka pada tanggal 15-16 Oktober 1947 diadakanlah Konferensi ke-2 di Kutaraja (sekarang Banda Aceh). Dalam konferensi ini terpilih Tgk. Ayub Samy menjadi Ketua Pengurus Besar Pemuda PUSA menggantikan Tgk. Amir Husein Almujaheed yang pada waktu itu memimpin Biro perjuangan dengan pangkat Jendral Mayor. Dalam konferensi ini juga terpilih kembali T. M. Amin selaku sekretaris umum P.B, juga terpilih A.R. Hasyim dan Ismuha, masing-masing sebagai sekretaris I dan II. Sejak saat itu P.B PUSA berkedudukan di Kutaraja.

Selain itu, konferensi itu juga memutuskan akan mengadakan Kongres PUSA ke II pada tahun 1947 bertempat di Lhokseumawe, tetapi kemudian karena semakin hebatnya perjuangan menghadapi Belanda, kongres tersebut ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.³¹

Baru sesudah berakhirnya perjuangan fisik melawan Belanda dengan berlangsungnya penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah RIS tanggal 27 Desember 1949, Kogres PUSA ke II dipikirkan kembali. Demikianlah pada tanggal 12-16 Rabi'ul Awal 1370 bertepatan dengan tanggal 22-26 Desember 1950, berlangsung Kongres PUSA di Kutaraja. Kongres ke II ini antara lain membicarakan :

³¹ Ismuha, *Ibid*.

1. Pembaharuan organisasi sesuai dengan zaman baru
2. Memperjuangkan otonomi daerah Aceh
3. Pendidikah di sekolah-sekolah dan Dayah-dayah
4. Penyantunan yatim piatu dan fakir miskin
5. Penyiaran dan pengembangan Agama Islam
6. Pembangunan dalam bidang ekonomi, industri dan pertanian
7. Memilih pengurus baru.

Kongres memilih Tgk. Abdul Wahab Seulimeum menjadi Ketua Umum PB PUSA menggantikan Tgk. M. Daud Beureueh. Sedangkan Sekretaris Umum tetap dipegang T. M. Amin. Untuk Ketua Pemuda PUSA kembali dipimpin oleh Tgk. Amir Husein Almujaheed.³²

Kemudian Kongres ke-2 ini dilanjutkan dengan anak kongres di Kuala Simpang, Aceh Timur pada tanggal 12-14 Rabi'ul Awal 1370 bertepatan dengan 21-23 Januari 1951. anak kongres ini antara lain memutuskan : Menunjuk T.M Amin dan Ismuha untuk duduk dalam Dewan Partai Masyumi PUSA. Kemudian pada tanggal 25-29 April 1953 bertempat di Langsa dilangsungkan Kongres ke III. Kongres ini antara lain membicarakan secara mendalam keputusan Alim Ulama dan Mubaligh se Indonesia yang telah berlangsung di Medan pada tanggal 11-15 April 1953, dan perjuangan kembali Propinsi Aceh yang sejak Negara

³² Ismuha, *Ibid*, hlm. 38.

Kesatuan Republik Indonesia telah dilebur ke dalam Propinsi Sumatera Utara. Pada musim haji tahun 1953, Ketua Umum PUSA Tgk. Abd Wahab Seulimeum menunaikan ibadah haji. Pada saat sedang melaksanakan ibadah haji, di tanah air terjadi pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Tgk.M. Daud Beureueh.³³

Pemberontakan DI/TII di Aceh merupakan puncak kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah Pusat yang tidak mau memenuhi tuntutan rakyat Aceh. Walaupun pemberontakan DI/TII dipimpin oleh tokoh-tokoh PUSA, namun secara organisasi PUSA tidaklah terlibat. Hal ini diperkuat oleh ucapan Wakil Perdana Menteri pada saat itu Wongsonegoro. Menurut beliau "andaikata pemerintah pusat menganggap PUSA yang memberontak, tentulah Bupati A. Wahab yang berasal dari pemuda PUSA sudah dipecat, tapi sampai sekarang Bupati A. Wahab tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II".³⁴

Walaupun Wakil Perdana Menteri telah meyakinkan semua orang bahwa PUSA tidak terlibat dalam pemberontakan DI/TII di Aceh, namun atas keberhasilan manuver politik dari anggota parlemen dari PKI, pandangan orang akan PUSA berbalik seratus delapan

³³ *Ibid*, hlm. 39.

³⁴ Shabri A. et. Al., *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX* jilid I. (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003). Hlm. 32.

puluh derajat. Sejak akhir September 1953 PUSA dan Pemuda tidak bergerak lagi.

B. Tokoh-tokoh di balik Keberadaan Persatuan Ulama Seluruh Aceh

1. Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap

Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap lahir di kampung Meunasah Meutjap, Kecamatan Peusangan, Matang Glumpang Dua (sekarang bagian wilayah Kabupaten Bireun). Ia adalah putra dari Teungku Muhammad Hanafiah yang lebih terkenal dengan nama panggilan Teungku Let Yah yang menjabat sebagai Teungku Imum di Kampung Meunasah Meutjap. Tahun kelahiran Teungku Abdurrahman tidak diketahui secara pasti, namun diperkirakan pada tahun 1897 Masehi atau bertepatan dengan tahun 1316 Hijriah. Nama yang diberikan orang tuanya adalah Abdurrahman. Tetapi sesudah beliau memiliki pengetahuan agama (alim) dan dihormati karena jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan agama, orang mulai menyebut dengan merangkaikan nama kampung di belakang namanya, sehingga panggilannya menjadi Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap. Hal seperti ini di Aceh lazim digunakan seperti juga Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Chik Di Tiro, Teungku Chik Pante Kulu, Teungku Hasballah Indrapuri dan lain-lain. Bahkan ada yang tidak menyebut nama aslinya lagi, tetapi cukup hanya menyebut nama tempat tinggalnya atau nama

tempat ia mengajar seperti Teungku Meunasah Meutjap atau Teungku Di Matang Glumpang Dua.

Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap mempunyai empat orang istri dan tujuh orang anak. Adapun nama-nama istrinya adalah yang pertama Fatimah binti Haji yang dianugrahi empat orang anak, satu anak laki-laki dan tiga putri. Nama putra-putrinya adalah Siti Ramlah, Muhammadar, Azizah, dan Zubaidah. Istri kedua bernama Fadilah yang melahirkan seorang putra yang bernama Afifuddin. Istri ketiga bernama Aisyah yang juga melahirkan seorang putra yang bernama Fakhri. Sementara istri keempat bernama Fatimah. Dari istrinya ini Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap juga mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Khairuddin.

Sebagaimana lazimnya anak-anak yang dilahirkan dari keluarga ulama dan dalam suatu masyarakat yang Islami seperti masyarakat Aceh, Abdurrahman semasa kecilnya bersama anak-anak sekampungnya belajar pendidikan agama (mengaji Al Qur'an, belajar kitab-kitab agama) di kampungnya yang kebetulan orang tuanya sendiri adalah Teungku Imum dan guru agama di kampungnya tersebut. Di samping belajar pendidikan agama, Abdurrahman oleh orang tuanya Teungku Muhammad Hanafiah juga diajarkan bahasa *Jawo* (bahasa Melayu). Pelajarannya meliputi *Malasailal Muhtadi*,

Bidayatul Mujtahid, Miftahul Jannah, Shiratul Mustaqim, Sabilal Muhatadie, Majmuk, Furuk Masail.³⁵

Ketika berumur 15 tahun (tahun 1912) Abdurrahman meninggalkan kampung halaman dan berangkat ke Ulee Ceue Samalanga Kabupaten Bireun untuk belajar pendidikan agama di Ulee Ceue Samalanga selama dua tahun. Pada tahun 1915 Abdurrahman pindah belajar ke Peudada (Kabupaten Bireun) pada Teungku Raden Peudada selama satu tahun dan tahun 1916 pindah lagi belajar ke Cot Meurak Bireum pada Teungku Haji Muhammad Amin. Di tempat ini ia belajar sangat tekun dan relatif lama yaitu sampai 13 tahun lamanya.

Sementara itu Abdurrahman berguru pula ke Tanjung Samalanga, Kuta Blang Samalanga, ke Garut (Kabupaten Pidie) yang kemudian melanjutkan pendidikan ke Dayah di Lhokseumawe di mana keseluruhannya berjumlah tiga tahun lamanya.

Setelah menimba ilmu agama pada beberapa teungku di Aceh, Abdurrahman masih ingin memperdalam ilmu dalam bidang ilmu falak. Beliau mendengar bahwa di Sumatra Timur ada seorang ulama besar yang mahir dalam bidang ilmu falak yaitu Syeikh Hasan Ma'shum, maka pada tahun 1929 dengan tiga orang temannya yaitu Teungku Ahmad Lampupok Indrapuri, Teungku Arifin Samalanga,

³⁵ Rusdi Sufi. "Teungku Abdurrahman Meucap", *Makalah* disampaikan pada Mengenang Ulama Teungku Abdurrahman Meucap di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2004.

dan Teungku Muhammad Husen Niron Sibreh Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar.

Teungku Abdurrahman beserta tiga orang temannya ini selanjutnya berangkat ke Sumatra Timur menuju Tanjung Pura ibukota Kerajaan Langkat. Di sana mereka menemui Syeh Usman, Qadli Sultan Langkat untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka yaitu ingin memperdalam ilmu falak.

Syekh Usman menyuruh Teungku Abdurrahman dan tiga orang temannya menemui kepala sekolah. Namun kepala sekolah tidak dapat menerima mereka dengan alasan karena umur mereka sudah tidak sebaya dengan pelajar-pelajar yang sudah ada dan mereka dianggap sudah dapat mengajar di sekolah tersebut. Kepala sekolah menganjurkan kepada Teungku Abdurrahman dan tiga temannya supaya berguru kepada Tuan Syeh Usman di Medan. Anjuran ini dituruti, sehingga mereka belajar ke Medan. Sesampai di Medan ternyata Tuan Syeh Usman tidak memberi waktu khusus. Teungku Abdurrahman disuruh mengikuti pelajaran bersama pelajar-pelajar lainnya. Sesudah dicoba ternyata pelajaran yang diberikan masih rendah, lalu Teungku Abdurrahman beserta tiga temannya memutuskan untuk kembali ke Tanjung Pura. Di Tanjung Pura, mereka tinggal kurang lebih enam bulan. Di sini Teungku Abdurrahman memperhatikan cara belajar dengan memakai bangku dan papan tulis (secara klasikal), yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan cara berhalqah di dayah. Sepulangnya dari Langkat, Teungku

Abdurrahman timbul hasrat untuk mengajar cara sekolah di Dayahnya.

Teungku Abdurrahman adalah seorang ulama yang pergaulannya luas, wawasannya tidak saja di kalangan ulama dayah, tetapi juga dengan guru-guru *Volkschool* dan *Verologschool* yang ada di Keude Matang Geulumpang Dua, di antaranya Teungku Nurdin dari Sumatra Utara, Teungku Sutan Mangkudum berasal dari Sumatra Barat, Djakfar Lagutan berasal dari Mandailing Sumatra Utara, Guru Husein Samalanga, dan beberapa orang lainnya.

Dari pergaulannya itu, Teungku Abdurrahman mendapatkan informasi tentang kemajuan agama di luar Aceh. Sistem pendidikannya telah dijalankan melalui sistem sekolah. Tidaklah mengherankan Teungku Abdurrahman adalah seorang ulama dayah yang dapat menerima ide baru untuk merubah sistem pengajaran agama dari sistem pengajaran tradisional dayah ke sistem sekolah/madrasah.

Selain sebagai penggagas organisasi PUSA yang merupakan salah satu organisasi pergerakan di Aceh, Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap juga sebagai tokoh pembaharu pendidikan agama. Kiprahnya ini dapat dilihat sejak beliau memulai karirnya sebagai pendidik pada tahun 1920, yaitu sebagai pengajar di Dayah Cot Murak dan Dayah Ulee Ceue, Samalanga. Setelah mendapatkan pengalaman sebagai pengajar pada dayah-dayah tersebut pada tahun 1926 Teungku Abdurrahman membuka sebuah dayah di kampung kelahirannya Meunasah Meutjap. Karena kepopulerannya Teungku

Abdurrahman selaku tokoh yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama, maka dayah ini dikunjungi oleh banyak murid yang ingin menimba ilmu daripadanya. Mereka yang datang ini berasal dari berbagai daerah di Aceh. Karenanya kampung Meunasah Meutjap menjadi ramai dengan murid-murid yang datang belajar ke dayah tersebut. Hal inilah kemudian yang menyebabkan panggilan Teungku Abdurrahman populer dengan sebutan Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap atau Teungku Meunasah Meutjap. Meskipun para pelajar di dayah Meunasah Meutjap telah menaruh kepercayaan dan merasa puas dengan apa yang telah diajarkan oleh gurunya kepada mereka, tetapi Teungku Abdurrahman sendiri belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh karena itu, setelah tiga tahun menjadi guru di dayahnya, Teungku Abdurrahman mengambil keputusan untuk belajar kembali pada Dayah Cot Murak, yang kemudian diikuti pula oleh hampir sebagian besar muridnya pindah belajar ke Dayah Cot Meurak tersebut.

Akibat pengaruh dari kehadiran pendidikan Barat di Aceh yang kemudian diterima oleh masyarakat Aceh, telah menimbulkan kegelisahan pada figur Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap. Beliau melihat dan menyadari bagaimana pola pendidikan agama yang sudah ada di Aceh bila dibandingkan dengan sistem pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah Belanda. Untuk hal ini beliau sering mendiskusikannya dengan ulama Aceh lainnya. Dari hasil-hasil diskusi itu, timbullah gagasan dari Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap untuk merombak atau memperbaharui sistem pendidikan agama

di Aceh, dari sistem dayah yang tradisional ke sistem madrasah yang modern dengan meniru beberapa model dari pendidikan Belanda. Ide ini pada mulanya kurang mendapat sambutan dari sebagian ulama. Hal ini antara lain disebabkan karena pada waktu itu masih banyak orang yang menganggap bahwa segala sesuatu yang berbau "Belanda", haram hukumnya.

Ada beberapa sebab yang mendorong Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap berhasrat merubah sistem pendidikan dari bentuk dayah ke bentuk pendidikan madrasah atau sekolah. Di antaranya adalah saran dari ulama-ulama yang datang berdiskusi dengannya, terutama Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Ayah Hamid Samalanga serta anjuran-anjuran dari guru-guru sekolah umum (*volkschool*). Selain itu, ia berpikir bahwa untuk membentuk kader-kader yang berilmu pengetahuan, tidak cukup dengan hanya pengetahuan agama saja, tetapi juga harus mengetahui ilmu pengetahuan umum.

Ide Teungku Abdurrahman mulanya hampir gagal karena kurangnya fasilitas dan dana, terutama bangunan fisik sekolah. Namun *uleebalang* setempat, yaitu Teungku Syik Muhammad Johan Alamsyah membantu segala macam fasilitas yang dibutuhkan untuk mendirikan lembaga pendidikan itu. Pada tanggal 24 November 1929 dibentuklah sebuah syarikat yang diberi nama Syarikat Al-Muslim Peusangan, untuk mengelola sekolah yang akan didirikan. Ketua Syarikat itu adalah Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap sendiri, sekretarisnya

Nurdin, dan selaku penasihat adalah uleebalang Peusangan, Teuku Muhammad Johan Alamsyah.

Pada akhir tahun 1929 syarikat ini membangun 2 buah kelas tempat belajar murid-murid Madrasah Al-Muslim Peusangan. Tempat ini kemudian menjadi cikal bakal dan tonggak sejarah Madrasah Al-Muslim Peusangan. Adapun guru-guru pertama yang mengajar pada lembaga pendidikan Al-Muslim pada waktu itu antara lain: Teungku Habib Mahmud, Teungku Ridwan, Teungku Abed Pante Ara, Teungku Abbas Berdan, Teungku Ibrahim Meunasah Barat, Teungku Hasan Ibrahim Awe Geutah, serta Teungku Abdullah Musa sebagai pemimpin kepanduan. Sedangkan Teungku Abdurrahman sendiri sebagai inspektur yang sewaktu-waktu menggantikan mengajar jika ada guru yang berhalangan hadir.

Pada tahun 1931 lembaga pendidikan Al-Muslim mulai membangun gedung permanen untuk tempat pendidikan. Namun sebelum pembangunan gedung tersebut selesai, Teungku Abdurrahman pergi ke Sumatra Barat untuk meninjau perkembangan pendidikan di sana yang sudah lebih maju, seperti Sumatra Thawalib, Kulliyatul Muballighin Padang, Islamic College Bukittinggi dan Diniyah Putri Kayu Tanam. Tujuan Teungku Abdurrahman selain untuk meninjau sistem pendidikan atau sistem belajar, juga untuk mengambil contoh bangunan gedung Al-Muslim yang akan dibangun di Aceh.

Tidak lama kemudian, Madrasah Al-Muslim berkembang ke daerah lain dengan mendirikan cabang-

cabang madrasah. Cabang-cabang madrasah tersebut antara lain di Cot Meurak Bireun, Cot Batee, Balai Setui Jangka, Bugak, Krueng Baro, Uteun Gathom, dan Lueng Leubu.

Pada saat pembentukan Propinsi Sumatra Utara pertama kali dan pejabat agama berubah stukturanya, Teungku Abdurrahman dicalonkan menjadi kepala bagian tata hukum pada jabatan Agama Sumatra Utara. Namun ia dalam keadaan sakit dan beristirahat di Takengon. Sakitnya ternyata tidak sembuh-sembuh hingga ia meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1949 dan dimakamkan di belakang gedung Madrasah Al-Muslim.

2. TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREU-EH

Pada tahun 1316 H lahirlah seorang bayi dari pasangan Teungku Ahmad dan Aminah di Gampong Beureueh Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidi. Bayi ini kemudian diberi nama Muhammad Daud Beureueh. Teungku Ahmad pada waktu itu menjadi *keucuhik* di Gampong Beureueh. Kakek dari Teungku Muhammad Daud Beureueh masih merupakan keturunan dari Raja Pattani Darussalam (Thailand Selatan), namanya Haji Muhammad Adamy.

Pada saat dewasa Teungku Muhammad Daud Beureueh menikahi seorang wanita yang bernama Teungku Cut Halimah. Dari perkawinan ini mereka dikarunia tujuh orang anak. Dari pernikahan kedua dengan Teungku Asma beliau dikarunia tiga orang putra dan perkawinan yang

ketiga mendapatkan seorang putra, sehingga seluruhnya berjumlah sebelas orang.

Perjalanan pendidikan yang dilalui oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh lebih banyak menempa ilmu pengetahuannya tidak melalui jalur pendidikan di lembaga formal, terutama yang dibuat oleh Belanda. Pendidikan yang dilaluinya lebih banyak diterima dari dayah tradisional di kampungnya. Pada saat itu telah didirikan berbagai sekolah buatan Belanda seperti *Volkschool*, *Holland Inlandsche School* dan lain-lain, dan Teungku Muhammad Daud Beureueh pernah belajar di *Gouvernement Inlandsche School* di Seulimum. Untuk menambah wawasan ilmunya ia lebih banyak belajar dari pengalaman guru-gurunya di dayah dan secara otodidak.

Membicarakan kiprah Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam dunia pendidikan, politik, dan organisasi, tidak mungkin dilakukan secara singkat mengingat nama beliau sangat jelas tertulis sebagai tinta emas di Republik Indonesia. Ia adalah seorang ulama dan pejuang yang sangat disegani baik oleh teman-teman seprofesinya maupun para tokoh-tokoh nasional. Setiap buah pemikiran dan fatwa yang diucapkannya didengar dan diteladani oleh masyarakat Aceh pada khususnya bahkan rakyat Indonesia pada umumnya. Ia adalah seorang orator ulung, berceramah dan menyampaikan pidato-pidatonya ke setiap daerah di Aceh selalu disambut dengan meriah oleh masyarakat.

Kiprahnya dalam dunia pendidikan sangat besar. Hal ini terbukti ketika ada arus pencerahan terhadap dunia

pendidikan di Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh menyambutnya dengan baik. Ia juga mengembangkan sistem baru dalam dunia pendidikan, di mana pendidikan juga merupakan wadah bagi pengembangan organisasi-organisasi pendidikan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Untuk itu, pengelolaan madrasah-madrasah dengan sistem pendidikan baru dilakukan dengan mendirikan pula organisasi seperti Jamiyah Diniyah, Jamiyah Hasbiyah, Jamiyah Madaniyah, Jamiyah Najdiyah, Jamiyah Khairiyah dan sebagainya. Semua ini merupakan cikal bakal dari organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).³⁶

PUSA adalah organisasi yang didirikan sebagai wadah para ulama dalam mempersatukan pemikiran terhadap kelangsungan hidup negeri ini. Sebelumnya telah ada di Aceh organisasi ulama yaitu Syarikat Islam, tetapi organisasi ini kemudian dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda.

PUSA awalnya bergerak dalam bidang pendidikan, sosial keagamaan. Kegiatan politiknya sangat terselubung. Pada kongres seluruh ulama yang diadakan di Matang Glumpang Dua pada tahun 1939 didirikanlah PUSA yang sekaligus mengangkat Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai ketua umum. Kemampuan luar biasa Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam memimpin organisasi baru ini menyebabkan PUSA dalam waktu singkat tumbuh menjadi organisasi besar dan sangat

³⁶Shabri A. *op.cit*, hlm. 67.

berpengaruh serta berhasil dalam menggerakkan kesadaran dan kekuatan rakyat.

Setahun setelah kongresnya yang pertama (1940) di Kota Asan Sigli organisasi PUSA kemudian dilengkapi dengan gerakan pemudanya yang bernama Pemuda PUSA, organisasi muslimatnya yang bernama Muslimat PUSA. Selain itu, didirikan pula sebuah organisasi kepanduan (pramuka) yang bernama Kepanduan Islam atau Kasysyafatul Islam. Dengan demikian, PUSA menjelma menjadi organisasi besar yang amat disegani oleh pemerintah Belanda pada waktu itu.

Markas PUSA itu sendiri berada di tiga tempat, pusat PUSA berada di Sigli di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan sekretarisnya Teuku Muhammad Amin. Pemuda PUSA berpusat di kota Idi di bawah pimpinan Teungku Amir Husin Al Mujahid sebagai ketua umum dan sekretarisnya Teungku Abubakar Adamy. Kasysyafatul Islam bermarkas di kota Bireun di bawah pimpinan Abdulgani Usman (Ayah Gani) sebagai ketua Kwartir Besar.

Setelah pecah Perang Asia Timur Raya, PUSA mengambil satu kebijakan politik yang amat penting, yaitu tidak bekerjasama dengan Belanda dalam menghadapi Jepang. Meskipun ini diserukan oleh pemimpin Indonesia di Jakarta. Tetapi kesempatan ini justru dipergunakan untuk memberontak terhadap kekuasaan Belanda yang telah goyah. Para pemimpin PUSA dan para pemimpin pemuda PUSA mengorganisir gerakan bawah tanah untuk memimpin pemberontakan dan pada bulan Februari pecah

pemberontakan pertama di Seulimum yang dipimpin oleh Teungku Haji Hasballah Indra Puri, Teungku Abdui Wahab Seulimum dan rekan-rekannya. Kemudian pemberontakan di Sigli dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh sendiri selanjutnya di Aceh Barat dipimpin oleh Teuku Sabi Lageun sehingga akhirnya ulama seluruh Aceh turut memberontak terhadap Belanda .

Jika sebagian besar tokoh-tokoh pergerakan Kemerdekaan Indonesia banyak yang mempercayai sikap Jepang yang manis sewaktu akan menduduki Nusantara, tetapi sikap PUSA jelas tetap sama dalam menanggapi masuknya Jepang ke Aceh seperti bersikap kepada Belanda. Sehingga sikap menentang ini diketahui oleh Kempetai dan akibatnya beberapa tokoh PUSA ditangkap oleh Jepang termasuk di dalamnya Teungku Muhammad Daud Beureueh. Namun atas usaha yang intensif dari rekan-rekan seperjuangannya dalam perundingan pelepasan tokoh-tokoh politik Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama rekan-rekan yang ditangkap oleh Jepang berhasil dibebaskan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 rakyat Aceh di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh dan ulama-ulama lainnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan bergabung bersama API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia di Aceh yang dibentuk oleh Syamaun Gaharu. Teungku Muhammad Daud Beureueh pada saat itu tergabung dalam divisi Teungku Chik Di Tiro sebuah organisasi Mujahiddin

dan selain itu ada dua divisi lainnya yang berdiri yaitu Divisi Rencong, Divisi Payabakong, Tentara Pelajar /TRIP dan Tentara Pelajar Islam. Untuk menggabungkan kekuatan ini dan kompak dalam setiap kerja sama Teungku Muhammad Daud Beureueh diangkat menjadi Gubernur Militer Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Mayor Jenderal. Di bawah kepemimpinan beliau dibentuklah TNI di Aceh.

Berbagai kebijakan politik yang diciptakan oleh pemerintahan pusat menyebabkan keguncangan-keguncangan di beberapa daerah di tanah air di Indonesia, termasuk di Aceh sendiri. Rasa kecewa rakyat Aceh karena merasa tidak dihargai atas apa yang telah dikorbankan demi kemerdekaan negara Indonesia menyebabkan terjadi pergerakan pada tahun 1953 yang terkenal dengan peristiwa DI/TII. Meskipun alasan kejadian ini tidak sesingkat tulisan ini, tetapi peristiwa ini menjadi catatan sejarah penting yang dilakukan oleh ulama di Aceh setelah kemerdekaan Indonesia. Para pengamat politik mengakui bahwa tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, Aceh adalah daerah modal. Jadi Gerakan DI/TII ini dianggap unik. Daerah Aceh hingga 1 Januari 1950 menjadi propinsi yang mempunyai status otonom, namun status ini hanya bertahan kurang dari satu tahun. Hal ini disebabkan pemberian kekuasaan kepada Sjarifuddin Prawiranegara. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1949 apabila terjadi kegagalan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) maka Aceh bebas dari pendudukan Belanda. Atas dasar kekuasaan yang diberikan tersebut Sjafruddin Prawiranegara memecah Propinsi Sumatera Utara menjadi

dua keresidenan, yaitu Aceh dan Tapanuli (Sumatera Timur) dengan kondisi Aceh kembali bergabung dengan Sumatera Utara maka timbul berbagai tuntutan untuk menjadi daerah otonom lagi, seperti dalam sidang DPRD Aceh tanggal 12 Agustus 1950 yang menghasilkan 3 mosi diantaranya bila tuntutan Aceh untuk mendapat propinsi sendiri di bawah pemerintahan pusat tidak dipenuhi maka putera-putera Aceh yang duduk dalam pemerintahan yang sepaham akan segera mengundurkan diri. Sementara itu, terjadi ketegangan antar PUSA dan Badan Kelaskaran Rakyat (BKR). Pada Kongres alim ulama se Indonesia di Medan memutuskan untuk mempertahankan agar dalam pemilu yang akan datang negara RI menjadi negara Islam. Untuk menarik simpati rakyat Teungku Muhamad Daud Beureueh mensosialisasikan hasil kongres di Medan ke seluruh pelosok Aceh. Dalam suasana ketegangan ini Teungku Muhamad Daud Beureueh akhirnya memproklamlirkan bahwa Aceh bagian dari Negara Islam Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan peristiwa DI/TII.

Konflik yang berlangsung dari tahun 1953 berakhir di tahun 1959 yang diselesaikan melalui perundingan-perundingan baik di pihak RI maupun DI/TII. Pemerintah pusat menyadari kekeliruan yang dilakukan. Status Aceh menjadi Propinsi Daerah Istimewa Aceh. DI/TII beserta kaum ulama dan pendukungnya kembali kepangkuan RI.

Teungku Muhamad Daud Beureueh berpulang ke rahmatullah pada bulan Juni 1987 dan dimakamkan dengan

sederhana sesuai permintaan beliau di kampung halamannya.

3. TEUNGKU HAJI ABDULLAH UJONG RIMBA

Teungku Haji Abdullah Ujongrimba dilahirkan di Kampung Ujongrimba Kabupaten Pidie pada tahun 1900. Orang tuanya bernama Teungku Haji Hasyim masih keturunan *Uleebalang* Peusangan Aceh Utara. Seperti umumnya pada masyarakat Aceh pendidikan dasar yang diperoleh seorang anak dalam keluarga adalah diberikan dari orang tua mereka, terutama yang berhubungan dengan pendidikan agama dan akhlak. Oleh karena itu, Teungku Hasyim memilih lembaga pendidikan *dayah* sebagai alternatif bagi Abdullah Ujong Rimba. *Dayah* yang pertama dilalui oleh Teungku Haji Abdullah Ujongrimba adalah *Dayah le leubeu*, selanjutnya ke *Dayah Lamsi* pimpinan Teungku Panglima Polem Muhammad Daud di Kabupaten Aceh Besar. Di *dayah* ini beliau memperdalam ilmu hadis, tafsir dan fikih.³⁷

Pada tahun 1924 (1344 Hijriah) Teungku Haji Abdullah Ujongrimba berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan belajar di sana. Beliau bermukim di Mekkah selama tiga tahun dan selama berada di sana memperdalam ilmu tafsir, fikih, sejarah, mantik, ilmu kalam dan juga berguru pada mursyid Tarekat Al Haddadiyah.

³⁷*Ibid.* hlm. 14.

Sekembalinya dari tanah Suci beliau mendirikan sebuah pusat pendidikan Islam yang diberi nama Dayah Ujongrimba. Di dayah inilah ia mengembangkan ilmunya. Bahkan bersama dengan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, ia merubah pola pendidikan Islam di Aceh yang semula berbentuk dayah-dayah tradisional menjadi madrasah-madrasah, serta menambah kurikulum dengan ilmu bahasa Inggris dan Belanda.

Meskipun Teungku Haji Abdullah Ujongrimba adalah seorang yang berpaham tharikat Haddadiyah namun ia tidak dapat membenarkan aliran-aliran kebatinan yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Ia melarang praktek-praktek tharikat yang bertujuan untuk mencari uang dengan mengkultuskan diri sendiri supaya dianggap orang sebagai "ulama keramat". Untuk memberantas aliran-aliran kebatinan dan praktek-praktek tharikat yang salah maka ia mengarang tiga buah buku yaitu:

1. Kitab *Salek Buta* yang bertujuan memberantas aliran-aliran kebatinan yang berasal dari paham Wahdatul Wujud.
2. Kitab *Ilmu Tharekat* yang bertujuan memberi keterangan tentang tarekat yang benar dan tarekat yang salah.
3. Kitab *Hakikat Islam* yang bertujuan menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya.

Dari karya tulis ketiganya dapat dijelaskan bahwa meskipun Teungku Haji Abdullah Ujongrimba menganut tarekat Al Haddadiyah namun beliau sama sekali tidak

dapat membenarkan aliran-aliran kebatinan yang telah menyeleweng dari ajaran agama Islam. Beliau menentang tarekat-tarekat yang bertujuan mencari uang dengan mengkultuskan diri sendiri supaya dianggap sebagai ulama keramat.

Kiprah Teungku Haji Abdullah Ujongrimba dalam organisasi dan politik diantaranya; beliau bergerak dalam organisasi PUSA. Atas kegelisahannya dengan kondisi negara Republik Indonesia, maka beliau bersama-sama dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama ulama-ulama lainnya mendirikan Negara Islam yang dinamakan Darul Islam dengan tentaranya yang bernama Tentara Islam Indoneisa (TII). Akan tetapi pada tahun 1956 beliau kembali ke pangkuan RI.

Kiprahnya di dunia pemerintahan juga tercatat pada masa Jepang, ia menjadi anggota *Atjeh Syu Syuko Hoin* (Mahkamah Tinggi Agama Daerah Aceh). Tahun 1946 menjadi ketua Mahkamah Syariah Kabupaten Pidie di Sigli, dan pada tahun 1960 menjadi ketua Syariah Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh hingga pensiun. Pada tahun 1968 beliau diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam satu periode dan karenanya mendapat bintang Mahaputra kelas III. Dalam Pemilihan Umum tahun 1977 dan 1982 Teungku Haji Abdullah Ujongrimba terdaftar menjadi calon anggota DPR dalam daftar Golkar dan beliau terpilih, tetapi mengundurkan diri. Dalam tahun 1977 ia memilih menjadi anggota MPR RI mewakili Golkar.

Teungku Haji Abdullah Ujongrimba adalah orang yang eksis dalam menentang ajaran komunis. Pada saat beliau menjabat sebagai ketua Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Daerah Istimewa Aceh, Panglima Kodam I Iskandar Muda selaku Penguasa Perang Daerah Istimewa Aceh meminta pendapat mengenai G 30 S PKI dalam pandangan hukum Islam, salah satunya kepada Teungku Haji Abdullah Ujongrimba. Pada saat itu juga sedang berlangsung musyawarah Alim Ulama se Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 17--18 Desember 1965 yang dihadiri sebanyak 56 alim ulama terkemuka di seluruh Aceh. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Teungku Haji Abdullah Ujongrimba yang menghasilkan keputusan-keputusan penting yaitu Komunisme Kufur/haram hukumnya, penganutnya yang sadar adalah kafir, pelaku G 30 S PKI adalah *kafir harbi* yang wajib ditumpas, pembubaran PKI wajib hukumnya. Sebagai hasil pembicaraan tersebut diambil kesimpulan bahwa peristiwa G 30 S PKI adalah masalah penting dan perlu ditangani sesegera mungkin. Sehingga pada tanggal 19 Desember 1965 Panglima Kodam I Iskandar Muda mengumumkan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi bawahannya di Daerah Istimewa Aceh. Selain itu musyawarah memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi ulama yang diberi nama Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh (MUI) sekarang menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan sebagai ketua pertama terpilih Teungku Haji Abdullah Ujongrimba.

Sejak terpilih sebagai ketua Majelis Ulama beliau terus menerus menjadi ketua. Namun karena kondisi

kesehatannya mulai menurun, tidak memungkinkan lagi untuk memimpin organisasi tersebut. Akhirnya pada tahun 1982 terjadi perubahan pengurus, kedudukan ketua Majelis Ulama digantikan oleh Ali Hasjmy sedangkan Teungku Haji Abdullah Ujongrimba mendapat kedudukan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 11 September 1983 Teungku Haji Abdullah Ujongrimba berpulang ke rahmatullah, maka Aceh kehilangan satu lagi ulama besar.

4. TEUNGKU AHMAD HASBALLAH INDRAPURI

Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri lahir pada tanggal 3 Juni 1888 (23 Ramadan 1305) di Kampung Lam U, Montasiek, Aceh Besar. Ayahnya bernama Teungku Umar bin Auf atau yang lebih dikenal dengan Teungku Cik Lam U, sedangkan ibunya bernama Safiah. Teungku Hasballah putra tertua dari Teungku Umar. Setelah menjadi ulama, Teungku Hasballah lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Abu Indrapuri.

Semenjak kecil, ia sudah berkepribadian dan bertingkah laku yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, ia sangat tegas dan berani membela kebenaran. Selain itu, ia juga seorang yang jujur, disiplin dan taat melaksanakan ibadah. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas, suka menolong, dan gemar menghafal Alquran.

Sebagaimana kebiasaan anak-anak di Aceh, pendidikan pertama diperoleh dari orang tuanya. Demikian juga halnya dengan Ahmad Hasballah, ia memperoleh

pendidikan pertama dari orang tua, apalagi ayahnya seorang teungku di kampungnya, sehingga perhatiannya terhadap pendidikan anak sangat diutamakan. Ia belajar membaca Alquran, dan masalah-masalah agama lainnya dari orang tuanya.

Setelah belajar dasar-dasar agama dari orang tuanya, ia kemudian melanjutkan pendidikan di dayah milik orang tuanya sendiri. Untuk lebih memperdalam dan memperluas ilmu tentang agama, Ahmad Hasballah juga belajar dari dayah-dayah yang lain, seperti Dayah Piyeung, Dayah Samalanga, Dayah Titeu, dan Dayah Lamjabat.

Ketika Teungku Umar berangkat ke Malaysia beserta dua orang temannya, yaitu Teungku Muhammad Arayad le Leubeu dan Teungku Muhammad Saleh, Ahmad Hasballah ikut serta bersama orang tuanya ke Malaysia. Mereka kemudian tinggal di Kedah dan mengajar pada salah satu lembaga pendidikan di daerah tersebut. Ketika berada di Malaysia, Ahmad Hasballah tetap saja melanjutkan belajar di mana ia berada.

Kegemarannya menuntut ilmu pengetahuan, sehingga ia tidak mencukupkan pendidikan yang ada di dayah-dayah. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Mekkah. Selama berada di sana ia terus memperdalam ilmunya dengan belajar berbagai macam cabang ilmu.

Setelah belajar sekitar dua belas tahun di Mekah, ia kemudian kembali ke Malaysia. Atas saran Teungku Hasan Kruengkale (teman Ahmad Hasballah) kepada pemuka masyarakat di Indrapuri, Ahmad Hasballah dipercayakan untuk memimpin Dayah Indrapuri. Untuk itu, dikirim

utusan ke Malaysia, menjemput Ahmad Hasballah dan ternyata ia bersedia pulang ke Aceh. Setibanya di Aceh, ia menetap di Indrapuri.

Selama Dayah Indrapuri berada di bawah pimpinannya, kemajuan semakin meningkat sehingga murib-murib mulai datang ke tempat itu dari berbagai daerah. Langkah pertama yang ditempuh dalam usahanya memperbaharui pendidikan Islam di Dayah Indrapuri, yaitu meningkatkan pendidikan iman dan ibadah. Itu sesuai dengan ajaran yang diterimanya selama belajar di Mekah yaitu ajaran tauhid, seperti yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh karena itu, memurnikan iman atau keyakinan dan ibadah adalah masalah pokok dan syarat mutlak bagi umat Islam untuk lebih maju serta terhormat.

Dalam rangka pembaharuan dan memajukan pendidikan Islam di Aceh, pada tahun 1927 Teungku Ahmad Hasballah mendirikan Madrasah Hasbiyah di Lingkungan Dayah Indrapuri, Aceh Besar. Pada mulanya madrasah tersebut terdiri dari dua tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah dengan sistem kurikulum yang sudah teratur.

Selain Madrasah Hasbiyah yang terbuka untuk pemuda dan pemudi, Teungku Ahmad Hasballah juga mendirikan *Al-Madrasah lil Ummahat* di Tanjung Karang Lheue, khusus untuk murid perempuan, yang juga bagian dari Dayah Indrapuri. Di antara murid-murid Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri yang terkenal adalah Teuku Ahmad Haji, Teungku Muda Wali, Tuanku Abdul Aziz,

Teungku Abdullah Husin, Teungku Muhammad Sufi Glee Karong, dan lain-lain.

Teungku Ahmad Hasballah selain aktif membina pendidikan, juga ikut aktif dalam pergerakan politik. Ia masuk anggota Syarikat Islam di Aceh, yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya, sehingga Dayah Indrapuri sudah menjadi salah satu tempat kegiatan Syarikat Islam. Pada tahun 1926, Syarikat Islam dilarang di Aceh, Teungku Ahmad Hasballah kemudian mendirikan satu pergerakan politik yang terselubung dengan nama *Jamiah al-Ataqiyah al-Ukhrawiyah* (Perhimpunan Kemerdekaan Akhirat). Perhimpunan itu ternyata sangat cepat berkembang dalam rangka membina kesadaran politik pemuda melalui pembinaan kesadaran iman dan takwa.

Ketika Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) didirikan, Teungku Ahmad Hasballah tampil sebagai salah seorang tokohnya dengan kedudukan sebagai Ketua Majelis Syura PUSA. Di samping itu, ia menjadi penasihat dari berbagai organisasi pemuda, seperti penasihat Pemuda PUSA, Serikat Pemuda Islam Aceh, Kepanduan Islam, Pergerakan Angkatan Muda Islam Indonesia, Lasykar Mujahidin, dan sebagainya. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi salah seorang pimpinan Masyumi di Aceh.³⁸

Pada awal tahun 1942, perlawanan terhadap kekuasaan Belanda terjadi tidak saja di Aceh Besar, tetapi juga di bagian Aceh lainnya. Situasi Aceh Besar pada waktu itu menjadi sangat gawat dengan terbunuhnya *controleur*

³⁸*Ibid.*, hlm. 37.

Belanda. Untuk itu, Belanda menjadikan daerah Seulimuem di bawah pemerintahan militer dan Majoor W.F. Palmer van den Brook, Komandan Korps Marechaussee diangkat menjadi kepala pemerintahan sipil/militer yang berkedudukan di Seulimuem.

Seperti yang disebutkan oleh A.J. Piekaar bahwa pemuda PUSA, Kepanduan Islam, dan Pergerakan Angkatan Muda Islam benar-benar telah memainkan peranan yang sangat penting, dan organisasi-organisasi tersebut selalu mendapat petunjuk dan bimbingan dari dua orang ulama besar, yaitu Teungku Abdulwahab Seulimuem dan Teungku Hasballah Indrapuri.

Selama pendudukan Jepang, Teungku Hasballah Indrapuri menjabat sebagai *Saibantyo Ku-Hooiin* (Ketua Pengadilan). Ia ini menggunakan sarana itu dalam rangka membela rakyat yang tertindas. Seiring dengan itu, ia terus berusaha mengukuhkan aqidah dan ibadah umat dalam menghadapi usaha-usaha Jepang yang hendak melunturkan keyakinan umat Islam.

Teungku Ahmad Hasballah, juga memberikan dukungan kuat kepada sekelompok pemuda PUSA, yang dalam tahun-tahun terakhir pendudukan Jepang, sedang giat mengadakan penelaahan tentang berbagai kemungkinan yang akan terjadi apabila Jepang kalah dan kemungkinan kembali lagi Belanda ke Aceh. Ia tidak hanya sekedar mendukung, tetapi juga turut berusaha ke arah pencapaian kemerdekaan. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri bersama tiga orang ulama lainnya (Teungku

Jakfar Siddik Lamjabat, Teungku Hasan Kruengkale, dan Teungku Muhammad Daud Beureueh), mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan kewajiban berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan dan kalau mati hukumnya mati syahid. Fatwa ini lebih populer dengan sebutan *Makloemat Oelama Seloeroeh Atjeh*"

Teungku Ahmad Hasballah kemudian pergi lagi ke Malaysia untuk yang kedua kalinya pada tahun 1958. Beliau berwasiat bahwa apabila ia meninggal maka dikuburkan dekat kuburan ayahnya. Tidak lama setelah berada di Malaysia, pada tanggal 26 April 1959, Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri berpulang ke rahmatullah dan dikebumikan di Kampung Yan Kedah, dekat makam ayahnya.

BAB 4

PERAN PUSA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

A. PUSA : Dalam Konstelasi Politik Lokal dan Nasional

Ulama lebih dikenal sebagai pemimpin masyarakat non formal. Hal ini menunjukkan bahwa peranan para elite agama atau ulama dalam masyarakat cukup besar dan cukup disegani. Apa yang difatwakan oleh mereka, lebih didengar dan dipatuhi oleh masyarakat dari pada apa yang dikatakan oleh pemimpin formal. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa pemimpin-pemimpin formal tidak bisa dengan serta merta melepaskan diri dari dukungan para ulama. Sejak masa kerajaan, masa penjajahan hingga kemerdekaan para ulama selalu mendampingi para pemimpin formal (umara) dalam melaksanakan pemerintahan, mulai dari unit pemerintahan tertinggi (kesultanan) hingga unit pemerintahan terkecil yang disebut *gampong* (kampung desa).

Besarnya pengaruh para ulama atau tokoh agama ini antara lain dapat dilihat dari serentetan sejarah di Aceh.

Cukup banyak literatur yang membicarakan peranan para ulama dalam masyarakat Aceh tempo dulu. Di antaranya laporan-laporan dari pihak kolonial Belanda yang menceritakan tentang kiprah para ulama Aceh. Misalnya karya C. Snouck Hurgronje, yang kemudian dijadikan buku berjudul *De Atjehers* dua jilid. Dari karya ini saja kita dapat melihat bahwa para alim ulama di Aceh cukup berperan dalam melawan Kolonial Belanda dan salah satu penyebab mengapa perang tersebut dapat berlangsung cukup lama, hampir tidak pernah berhenti hingga Belanda angkat kaki dari Aceh untuk selamanya ialah karena peranan para ulama tersebut. Dengan simbol-simbol keagamaan seperti Hikayat Perang Sabil, para ulama Aceh dapat membangkitkan semangat rakyat untuk tetap melawan Belanda.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika para penguasa kolonial menganggap para ulama ini sebagai tokoh-tokoh agama berbahaya yang selalu memotivasi rakyat untuk melawan serta memusuhi kolonial Belanda. Dalam perang dengan Belanda tidak pernah diketemukan para ulama yang menyerah meskipun kesultanan Aceh sudah mengalami keruntuhan. Kabanyakan diantara mereka syahid atau tertangkap.

Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya di Aceh pada tanggal 5 Mei 1939 diadakan masyawarah besar Alim Ulama di Peusangan. Dalam permusyawaratan itu, secara bulat memutuskan untuk membentuk suatu wadah yang menghimpun seluruh ulama sepaham, yaitu Tgk Beureueh sebagai ketua dan diikuti dengan pembentukan

organisasi-organisasi PUSA seperti organisasi Pemuda PUSA, Pandu PUSA Muslimat Lembaga Pendidikan PUSA, antara lain Normal Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan keadaan politik yang ada yang sedang berlangsung, seperti keadaan pada umumnya di Indonesia Organisasi PUSA tersebut akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan politik PUSA mengusir Belanda dan ikut aktif mendirikan negara Republik Indonesia. Walaupun dasar semula semata-mata untuk memurnikan Islam. Karena itu PUSA dalam dinamika nasionalisme Indonesia, baik pada periode pemerintahan Kolonial Belanda, penduduk Jepang maupun pada masa kemerdekaan sangat berperan.¹ Dalam hal ini Zulfan dalam tulisannya juga mengemukakan aktivitas PUSA mengandung unsur-unsur nasionalisme. Hal tersebut dapat kita kaitkan dengan konsep nasionalisme dikemukakan oleh Hans Kohn bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang berpendapat yaitu kesetiaan yang tertinggi kepada negara kebangsaan. Setiap bangsa mempunyai faktor objektif tertentu yang membuat mereka berbeda dengan bangsa lainnya, seperti perasaan turunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat istiadat, dan perasaan agama. Walaupun demikian faktor objektif tidak dapat mutlak juga ada tidaknya atau untuk merumuskan bangsa itu. Meskipun faktor objektif penting,

¹ Zulfan, "Agama dan Nasionalisme: Suatu Analisis Tentang Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Sebagai Sumber Kekuatan Nasionalisme Indonesia di Aceh". *Makala*, Konferensi Nasional Sejarah Indonesia VII, Jakarta : 28-31 Oktober 2001

namun unsur yang penting adalah kemauan bersama dalam kehidupan nyata. Kemauan inilah yang dinamakan nasionalisme, yaitu suatu paham yang memberikan ilham kepada sebagian besar penduduk dan mewajibkan dirinya untuk mengilhami segenap anggota-anggotanya Nasionalisme menyatakan bahwa negara kebangsaan yang dicita-citakan dan satu-satunya bentuk yang sah dari organisasi politik, dan budaya bangsa adalah sumber dari pada semua tenaga kebudayaan kreatif, kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian antara aktivitas dan tujuan PUSA mempunyai hubungan yang sangat erat dengan konsep nasionalisme.

Peran PUSA dalam konstelasi politik telah nampak jelas sejak masa Belanda. PUSA pada dasarnya bukanlah partai politik, tetapi kiprahnya di dunia politik sangat besar bagi terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Awalnya PUSA dibentuk dengan tujuan untuk mendirikan madrasah dan memperbaiki sistem pendidikan Islam. Selain dari pada itu para pemimpin PUSA mempunyai dayah-dayahnya sendiri, yang setelah pembaharuan sistem pendidikan Islam berubah namanya menjadi madrasah. Keadaan itulah yang mengakibatkan perkembangan PUSA mendapat dukungan luas dalam masyarakat Aceh.

Sebagai salah satu organisasi agama non-politik yang berpolitik, PUSA mengecam lawan politiknya yang berpihak pada Pemerintah Kolonial Belanda; dengan tuduhan bergerak untuk mengembalikan kesultanan Aceh. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan PUSA yang berjuang untuk menghancurkan pemerintah Kolonial

Belanda di Aceh sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, dalam dinamika gerakan baru PUSA, menunjukkan dirinya sebagai suatu faktor politik yang sangat penting.²

Keterlibatan PUSA dalam bidang politik yang berusaha untuk melawan Belanda, sebagaimana yang diungkapkan Veer mengemukakan berikut ini,

“Namun ada pula sesuatu yang baru telah menjadi kenyataan bahwa putera-putera dan cucu-cucu pahlawan Aceh yang terkenal dahulu, seperti panglima-panglima sagi XXII dan XXVI mukin yaitu Teuku Panglima Pölim Muhammad Ali dan Teuku Nyak Arief, turut dalam perlawanan-perlawanan itu, akan tetapi mereka itu bukanlah intinya. Intinya itu ada dua jenis Ada kolone kelima yang dibentuk oleh Jepang di Pulau Penang dan ada pula sebuah organisasi agama, yaitu PUSA yang telah bertindak sebagai gerakan di bawah tanah dalam perlawanan Itu ketua PUSA adalah Tgk. M. Daud Bureueh dari Sigli salah seorang pemimpin yang paling terkemuka. Para panglima sagi lebih banyak menyerupai peserta dari pada pemimpin”.³

Dengan demikian PUSA merupakan suatu kekuatan penting untuk mengusir Belanda di Aceh. Tindakan ke arah

²*Ibid.*, Baca juga Anthoy Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, (Jakarta: Sinar Harapan).

³ Paul Vant Veer, *Perang Belanda di Aceh*, terj: Aboebakar, (Banda Aceh : PDIA, 1980), hlm. 374.

tersebut secara nyata mulai dilaksanakan dalam bulan Desember 1941. Tgk. M. Daud Beureueh Ketua Pengurus Besar PUSA bersama para pemimpin lainnya mengadakan rapat di rumah T.Nyak Arief di Banda Aceh. Mereka berjanji dan bersumpah setia kepada agama Islam, kepada bangsa dan tanah air, serta memutuskan untuk bekerja sama dengan Nippon, dan melawan pnerintah Belanda. Mereka menyusun pemberontakan atas nama PUSA. Pada rapat tersebut ketua PB PUSA memberi surat pengangkatan kepada T. Nyak Arief menjadi penasihat umum PUSA dalam usaha melawan pemerintah Belanda dan menyambut kedatangan tentara Jepang yang membantu mereka bekerja sama membina kemakmuran Asia Timur Raya.

Keputusan tersebut dipertegas lagi dalam rapat terbatas para pemimpin PUSA pada Januari 1942, bahwa rakyat Aceh dibawah pimpinan PUSA harus melaksanakan untuk mengusir Belanda dari tanah Aceh sebagai : bagian dari Indonesia. Selain dari itu ditetapkan pula pengiriman utusan PUSA ke Malaya secepatnya untuk meminta bantuan senjata dari Jepang. Keputusan tersebut disampaikan secara rahasia kepada pemimpin-pemimpin PUSA di seluruh Aceh.

Setelah mempersiapkan kekuatan yang memadai maka pada tanggal 20 Februari 1942 para pemimpin PUSA di Aceh Besar didukung oleh *uleebalang* melancarkan perlawanan fisik terhadap tentara Belanda dan rumah *controleur* di Kota Seulimum. Selanjutnya perlawanan yang sama digerakkan di seluruh Aceh. Selain melancarkan

perlawanan fisik, PUSA juga menggerakkan rakyat untuk melakukan sabotase dan propaganda. Sehubungan dengan tindakan-tindakan tersebut maka penguasa pemerintah Kolonial Belanda yang berkebangsaan Belanda dan seluruh angkatan bersenjata Belanda di Aceh melarikan diri ke daerah perbatasan Sumatera Timur dan di sanalah kemudian mereka menyerah kepada Jepang. Ketika Jepang mendarat di pantai-pantai Aceh pada tanggal 12 Maret 1942 mereka dapat Aceh telah bersih dari orang-orang Belanda dan tentara-tentara Hindia Belanda.

Setelah Jepang menduduki Aceh, S. Matsubuchi seorang pemimpin *Fujiwara Kikan* membentuk pemerintahan baru dengan komposisi pemimpin pemerintahan didominasi oleh golongan PUSA. Tetapi setelah S. Lino menggantikan S. Mitsubuchi sebagai *Tyokai Aceh Syu* maka diadakan perubahan besar-besaran terhadap pejabat pemerintahan, sehingga golongan bangsawan (*Uleebalang*) memperoleh kembali kekuasaannya dari golongan PUSA.⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika perang tidak menguntungkan Jepang dan ketika penguasa militer mulai menuntut lebih banyak dari rakyat Aceh untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan pihak sekutu, maka Jepang memberikan konsesi-konsesi kepada mereka yang dianggap sebagai pemimpin populer, yaitu ulama. perubahan paling penting dari konsesi tersebut adalah

⁴ Ismuha, *Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI, 1976), hlm. 61

perbaikan tata usaha pengadilan yang dilaksanakan pada awal tahun 1944. Karena itu terjadilah pembatasan wewenang golongan bangsawan (*Uleebalang*). Semenjak saat itu golongan PUSA yang memegang kekuasaan yudikatif telah mampu menyaingi kekuasaan legislatif yang dikuasai oleh golongan *uleeбалang*. Kondisi tersebut juga tidak terlepas dari tujuan yang diinginkan oleh Jepang untuk melaksanakan politik adu domba antara golongan tersebut di atas.⁵

Para pemimpin ulama PUSA berperan serta dengan penuh semangat dalam berbagai organisasi yang didirikan untuk menggalakkan dukungan massa bagi tujuan perang Jepang. Kepentingan perang di Aceh pada umumnya terpenuhi baik spiritual maupun materil. Walaupun demikian Jepang tidak pernah menepati janji-janjinya terhadap masyarakat Aceh khususnya PUSA. Hal ini terlihat bahwa Jepang masih menjalankan politik adu domba antara bangsawan (*uleeбалang*) dan ulama PUSA, serta memeras tanaga dan harta benda rakyat. Sehingga terjadi kemelaratan yang luar biasa, kaadaan ini mengantar rakyat kembali melawan Jepang.

Dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari berbagai kebijakan Jepang, pemimpin PUSA/Pemuda PUSA mengadakan suatu musyawarah yang menghasilkan suatu keputusan bahwa kerja sama dengan Jepang tidak dilanjutkan. Kalaupun harus dipertahankan kerja sama itu masalah kerja sama taktik untuk menghindari jatuh korban

⁵ Zulfan, *op.cit.*, Baca juga Erid Morris dan Kahim Audury R. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, (Jakarta : Grafiti, 1990).

yang banyak sambil menunggu kesempatan yang tepat. Kemudian para pemimpin PUSA memperluas keputusan itu kepada seluruh anggota PUSA. Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka Pengurus Besar Pemuda PUSA mengedarkan kursus politik tertulis kepada para pemimpin PUSA di seluruh Aceh. Kegiatan tersebut akhirnya diketahui oleh Jepang, mereka sejumlah pemimpin PUSA ditangkap dan ditahan dalam *kempetai* Banda Aceh. Adapun pemimpin PUSA yang ditangkap Tgk. M. Daud Beureueh (Ketua Umum PUSA), Tgk Abdulwahab Seulimum (Wakil Ketua Umum PUSA), Tgk Amir Hasan Almujahtit (Ketua Umum Pemuda PUSA). Setelah satu bulan dalam tahanan mereka dibebaskan kembali kecuali Tgk Amir Husin Almujahtit dan Abubakar Adami, karena kedua tokoh tersebut harus menjalani hukuman selama tiga bulan.

Pada masa pendudukan Jepang para ulama telah berhasil merubah masyarakat, kalau pada masa Belanda masyarakat Aceh enggan menjadi serdadu Belanda, tetapi pada masa Jepang rakyat sudah tertarik menjadi pegawai dan tentara pendudukan Jepang, terutama yang bernama *Gyugun*. Para ulama sebagai *rnobilitas* rakyat tidak hanya memberikan pengertian kepada rakyat pada umumnya, tetapi juga ditekankan kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan juga kepada pemimpin-pemimpin PUSA sendiri untuk menjadi tentara pendudukan Jepang. Karena

itu timbullah animo rakyat secara besar-besaran untuk mendaftarkan diri sebagai tentara Jepang.⁶

Organisasi-organisasi angkatan bersenjata yang dibentuk oleh Jepang mendapat sambutan yang baik dari golongan ulama dan *uleebalang*. Kesempatan itu dipergunakan sepenuhnya oleh kedua golongan tersebut. Organisasi militer yang paling penting adalah *Gyugun*, yang dibentuk pada tahun 1943, sebuah satuan militer yang berdiri sendiri dengan para perwira Indonesia sendiri. Para perwira *Gyugun* kebanyakan berasal dari keluarga bangsawan, sedangkan prajuritnya pada umumnya berasal dari Pemuda PUSA.⁷ Mereka itu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia di Aceh.

Para ulama PUSA juga secara agresif berusaha menyelesaikan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan Jepang, terutama pada masa menjelang akan kalah perang. Usaha kearah tersebut bertanggung jawab, baik secara lisan maupun secara tulisan. Dalam realisasinya, kegiatan PUSA untuk meringankan penderitaan rakyat tidak ditanggapi oleh Jepang, sehingga keadaan rakyat bertambah krisis. Karena itu terjadilah pemberontakan rakyat terhadap Jepang di Aceh. Pemberontakan pertama terjadi pada tahun 1944 di Bayu di bawah : pimpinan Tgk. Abdul Djalil dan dapat membunuh

⁶ Ismuha, *op.cit.*, hlm. 61.

⁷ *Op.cit.*.

satu kompi tentara Jepang. Pemberontakan kedua terjadi di Pandrah pada bulan Mei 1945 di bawah : pimpinan Tgk. Abdul Djalii, dan berhasil membunuh 104 orang tentara Jepang. Kemudian terjadi serangan-serangan terhadap tentara Jepang yang bertugas di tempat-tempat terpencil di seluruh Aceh.⁸ Kedua ulama yang memimpin pemberontakan tersebut di atas tidak termasuk dalam golongan ulama PUSA.⁹

Proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin mengukuhkan eksistensi ulama sebagai penyambung aspirasi rakyat untuk mengumandangkan jihad akbar mempertahankan kemerdekaan. Dukungan ulama kepada Republik Indonesia dicetuskan pada 15 Oktober 1945 berupa pernyataan ulama seluruh Aceh yang ditandatangani empat ulama terkemuka yaitu Tgk. M. Daud Beureueh, Tgk. Ahmad Hasballah, Tgk Jakfar Sidik, dan Tgk. Hasan Kruengkale. Komite ini menyerukan kepada rakyat agar bersatu di belakang pemimpin besar Soekarno dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Karena Belanda sekali lagi akan mencoba menghancurkan agama kita yang murni dan juga menindas serta merintangi keagungan dan kemakmuran Indonesia. Dalam maklumat itu ditegaskan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan adalah suatu yang suci sebagai "perang sabil".¹⁰

⁸ Anthony Reid, *op.cit.*, hlm. 22.

⁹ Zulfan, *op.cit.*.

¹⁰ *Ibid.*

Di balik itu sebagian *uleebalang* telah mengadakan persiapan untuk menyambut kedatangan pasukan-pasukan sekutu. Sikap yang diambil oleh *uleebalang* sudah barang tentu mementingkan agar kedudukannya dapat dialihkan dan berkuasa kembali seperti sebelumnya, sehingga posisi yang menguntungkan *uleebalang* dapat diraih kembali. Sikap dan tindakan mereka tersebut pada akhirnya mengacu pada timbulnya Revolusi Sosial yang mengakibatkan banyak jatuh korban pada kedua belah pihak.

Konflik Revolusi Sosial bermula dikarenakan Teuku Muhammad yang menjadi *uleebalang* di Desa Cumbok, dekat Lameulo, Pidie mengemukakan bahwa ia seorang yang sangat berani dan menyukai aksi tindakan daripada diplomasi serta mempunyai sikap yang angkuh kepada ulama-ulama yang mencoba membawanya ke jalan yang benar. Selain itu, ia adalah orang yang paling tidak senang dengan orang atau kelompok yang sangat pro Republik, dalam dirinya muncul keyakinan bahwa Indonesia belum siap untuk merdeka dan secepat mungkin Belanda akan kembali ke Indonesia untuk memerintah. Sikap yang ditunjukkan inilah yang menyulut bentrokan-bentrokan antara kelompok Cumbok dengan PRI, misalnya ketika mereka melakukan kegiatan menurunkan bendera merah putih.¹¹

Pada tanggal 16 Desember golongan bangsawan Cumbok menteror perkampungan rakyat dengan tembakan-tembakan mortir. Aksi mereka dilaporkan ke

¹¹ *Ibid.*, Baca juga Abdullah Arief, *Sekitar Peristiwa Penghianatan Tjoemboek*, (Koetaradja: Tanapa Penerbit, 1949)

Residen Aceh, tetapi tidak mendapat tanggapan mungkin karena pemimpin pemerintahan pada saat itu dikuasai oleh golongan bangsawan. Oleh karena itu, kaum republiken yang menguasai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menuntut pihak eksekutif untuk menindak agresor Cumbok. Karena itu pemerintah mengeluarkan ultimatum dan mengerahkan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sedangkan para pemimpin PUSA mengerahkan semua organisasi militernya, sehingga terbentuk suatu kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan *Uleebalang* Cumbok. Pada akhir bulan Januari 1946 golongan bangsawan Cumbok tersebut berhasil dihancurkan.

Pada bulan Februari, pendiri Pemuda PUSA menggerakkan revolusi tahap kedua untuk menggulingkan *uleebalang* yang dianggap pro Belanda. Gerakan itu berlangsung hingga Maret dan berhasil melucuti semua kedudukan *uleebalang-uleebalang* dalam pemerintahan dan digantikan oleh golongan PUSA bersama sebagian *uleebalang* yang dianggap loyal kepada Republik Indonesia.¹²

Sebagai tindakan nyata dari maklumat 15 Oktober tersebut atas, maka pada tanggal 17 Nopember 1945 para ulama PUSA pembentuk Lasykar Mujahidin Pusat di bawah pimpinan Tgk. M. Daud Beureueh. Kemudian segera dibentuk cabang-cabangnya di seluruh Aceh.¹³ Tgk.

¹² Tgk.A.K. Yakobi, *Aceh Daerah Modal, Long March ke Medan Area*, (Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001, 1992), hlm. 32.

¹³ Ismuha, *op.cit.*, hlm. 70

M. Daud Beureueh sebagai ketua PUSA yang mempunyai kewibawaan yang cukup tinggi di mata masyarakat Aceh, pada bulan Juli diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo oleh pemerintah pusat langsung berhadapan dengan tugas militer yang cukup. Karena pada waktu itu Belanda melalui agresinya telah berhasil merebut kota Medan dan daerah sekitarnya. Panglima Sumatera Mayor Suharjo Haryowardoyo menginstruksikan melalui telegram kepada pemimpin-pemimpin Aceh yang berisi "Permintaan bantuan angkatan perang". Hal itu ditanggapi dengan seruan dan memang sudah merupakan tujuan dan tanggung jawab masyarakat Aceh pada umumnya. Dengan demikian, Gubernur Militer membentuk Resimen Medan Area. Resimen ini terdiri dari tiga batalion Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan dibantu oleh lasykar rakyat. Bantuan Aceh di bawah pimpinan PUSA terus dimasukkan ke Medan Area hingga perang kemerdekaan selesai.

Sehubungan dengan ancaman angkatan perang sekutu Belanda, pada 3 Juni 1947, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia, Panglima tertinggi Angkatan perang yang bertujuan meleburkan TRI dan segenap anggota laskar yang bersenjata menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perintah itu merupakan hal yang sangat sulit untuk direalisasikan, karena selain kondisi perang juga laskar rakyat terdiri dari beberapa kesatuan yang mempunyai wibawa dan eksistensi masing-masing. Walau demikian Tgk. M. Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer juga sebagai ulama berhasil merealisasikan perintah tersebut, yaitu meleburkan seluruh laskar rakyat menjadi TNI,

tepatnya pada tanggal 13 Juni 1948. Dengan demikian TNI yang dibentuk di Aceh merupakan hasil perundingan antara kelima unsur, yaitu unsur TNI dan empat kelompok laskar rakyat yang ada di Aceh.

Setelah Agresi Militer Belanda yang kedua, Aceh merupakan salah satu daerah yang belum dikuasai Belanda. Daerah-daerah yang sudah dikuasai umumnya telah dijadikan sebagai negara boneka seperti negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatra Timur dan lain-lain. Negara-negara tersebut dipersiapkan untuk membentuk negara federal.

Keadaan Indonesia pada masa itu menurut istilah Bung Sukarno tinggal sebesar payung lagi, yaitu daerah Aceh yang dinamakan daerah modal menjadi perhatian baru dimata Belanda. Belanda menawarkan negara Aceh yang berdiri sendiri dan kemudian akan menjadi bagian dari negara federal yang akan dibentuk. Usaha untuk mempengaruhi pemimpin Aceh ditempuh oleh Belanda melalui perantara DR. TK Mansur, Wali Negara Sumatera Timur.¹⁴ Tawaran politik dan kekuasaan yang menggiurkan itu tidak menggoyangkan komitmen Tgk. M. Daud Beureueh kepada Republik Indonesia, hal itu terlihat dari jawabannya.

Tidak ada perasaan kedaerahan di Aceh, jadi kami tidak mempunyai niat untuk mendirikan negara Aceh Besar karena kami berjiwa republiken. Kesetiaan rakyat kepada Republik Indonesia tidak berpura-pura dan tidak

¹⁴ Ismuha, *op.cit*, hlm.75.

pula dibikin-bikin, tapi tulus dan ikhlas yang timbul dari komitmen yang sejati yang dirasakan dalam hati diperhitungan dan pertimbangan yang kuat. Rakyat Aceh yakin bahwa kemerdekaan sendiri-sendiri, daerah demi daerah, negara demi negara tidak akan pernah dapat mencapai kemerdekaan abadi.¹⁵

Dengan demikian, tawaran tersebut di atas ditolak total oleh Gubernur Militer Aceh, sehingga daerah Aceh tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia yang sangat dibutuhkan, baik dalam perjuangan fisik maupun proklamasi. Selain tawaran kekuasaan dari pihak Belanda, para ulama PUSA, baik yang birokrat maupun yang tidak sangat berperan dalam menyelesaikan masalah yang timbul dari keinginan para ulama non PUSA dan pengikutnya yang bernafsu mendesak para pemimpin Aceh agar memproklamirkan kembali kesultanan Aceh dan melaksanakan hukum sepenuhnya.

Menanggapi masalah tersebut, para pemimpin Aceh yang tergabung dalam PUSA mengemukakan bahwa kita masyarakat Aceh sebagai bagian dari rakyat Indonesia tidak boleh dan tidak berhak mendahului keputusan Pemerintah Pusat dengan cara bertindak sendiri-sendiri. Kita harus berpegang teguh kepada Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dari Pancasila yang dijiwai oleh Piagam Jakarta dengan demikian rakyat yang sangat bernafsu menuntut agar segera melaksanakan

¹⁵ Erid Morris dan Kahim Audury R. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, (Jakarta : Grafiti, 1990), hlm.106

hukum Islam dapat ditenangkan kembali dan mereka dengan semangat patriotisme ikut aktif mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda.¹⁶

Dari uraian di atas tergambar jelas PUSA sebagai organisasi non politik tetapi sebenarnya telah berkiprah di dunia politik di tingkat lokal sekaligus berimplementasi pada tingkat nasional. Adanya PUSA tidak saja mengembangkan dan memurnikan agama Islam di Aceh, tetapi juga menumbangkan sistem pemerintah feodal dan mempertahankan Republik Indonesia. PUSA berhasil menghimpun dan memobilisasi seluruh potensi masyarakat Aceh dan membangkitkan semangat perjuangan dalam revolusi mengikis habis segala unsur NICA kontrarevolusioner dalam daerah Aceh, membendung dan menahan serangan Belanda dari Medan, menyelenggarakan administrasi dan organisasi pemerintah secara baik di seluruh Aceh, menyatukan seluruh laskar dan kelompok bersenjata dalam kesatuan TNI yang lengkap dengan persenjataannya, membiayai perjuangan sendiri dalam masa begitu sulit, membantu keuangan Pemerintah Pusat dan membeli dua buah pesawat terbang yang merupakan pesawat pertama Republik Indonesia, dan membantu segala keperluan wakil pemerintah Pusat yang mengungsi ke Aceh dan luar negeri. Mempersiapkan Kutaradja sebagai ibukota RI yang ketiga. Menolak ajakan Tgk. Mansur untuk membentuk negara bagian, sarta meyakinkan sebagian besar rakyat untuk menerima falsafah Pancasila dan

¹⁶ M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 41

meredam keinginan mereka untuk melakukan hukum Islam di Aceh.

B. PUSA : dalam Konstelasi Sosial Budaya Masyarakat

Munculnya ide untuk mendirikan PUSA dari Teungku Abdurrahman Meunasah Meutjap bersama beberapa ulama penggagasnya bertujuan untuk mengadakan perubahan sistem pendidikan di Aceh. Hal ini disebabkan adanya pertikaian di antara khalifah maupun faham-faham yang berbeda akan memunculkan masalah baru di bidang keagamaan yang berakibat kepada kondisi sosial budaya masyarakat Aceh nantinya. Atas dasar pemikiran ini maka segera harus dibentuk suatu wadah organisasi yang menghubungkan antar ulama satu dengan yang lainnya sehingga segala kesulitan, perpecahan dan perbedaan paham dapat dibicarakan bersama. Maka pada tahun 1939 PUSA didirikan bukanlah sebagai organisasi politik walaupun pada akhirnya kiprahnya di dunia politik tidak dapat dihindari. Tujuan PUSA adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syiar Islam yang suci, terutama di Tanah Aceh yang pernah digelar dengan Serambi Mekkah pada masa keemasannya yang telah silam dan yang dalam beberapa masa yang telah lalu sampai sekarang, telah berubah menjadi satu negeri yang amat ketinggalan bagi tetangganya yang berdekatan, apalagi yang berjauhan, dan sudah demikian lamanya terbenam dalam lembah kejahilan dan kegelapan.

2. Hendak berusaha sekuat tenaga untuk mempersatukan paham ulama-ulama Aceh tentang menerangkan hukum-hukum di mana mungkin, karena menurut yang telah dialami pada masa-masa yang telah lampau, pertikaian paham antara ulama-ulama kita, sering juga membawa kepada akibat yang tidak diinginkan oleh kita semua, begitu juga pertikaian paham itu adalah menjadi batu penggelincirkan langkah kemajuan Islam yang suci.
3. Berusaha memperbaiki dan mempersatukan *leerplan* sekolah-sekolah agama di seluruh tanah Aceh.

Di antara hasil PUSA yang pertama sekali nampak ialah setelah tujuh bulan berdiri didirikan Normal Islam Institut di Bireuen. Sebagai langkah pertama dari cita-cita hendak menyatukan *leerplan* pelajaran sekolah-sekolah Islam yang telah bertebaran di seluruh Aceh. Karena penyatuan rencana pelajaran itu tidak mungkin dijalankan kalau kemampuan para gurunya tidak sama pendidikannya. Jadi, sesuai dengan namanya, *Normal Islam Institut* itu adalah sekolah guru.¹⁷

Terlepas dari pro dan kontra para sejarawan dan pelaku sejarah sendiri namun kehadiran PUSA di Aceh telah memberikan sumbangan besar bagi sejarah sosial politik di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Guna sejarah menjadikan manusia dapat berpikir lebih bijaksana jadi apapun kata sejarah tetap yang

¹⁷ A. Hasjimy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamdun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.85-87

terpenting adalah kredibilitas dari tulisan sejarah itu tidak unsur sentrisme tetapi fakta adalah kebenaran, akhirnya tulisan ini kami tutup dengan: PUSA hadir sebagai fakta sejarah bukan untuk perdebatan sejarah di masa depan.

BAB 5

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Aceh merupakan salah satu daerah yang ikut berjuang melawan kolonialias Belanda dan Jepang. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh tidak pernah putus-putusnya, sehingga para kolonialis itu merasa kuwalahan menghadapinya. Kalau selama ini sala satu strategi menaklukkan Aceh dilakukan melalui perlawanan senjata, maka Belanda merubahnya melalui politik pasipikasi/etis.

Melalui politik ini, masyarakat Aceh diberi kesempatan menempuh pendidikan yang selama ini tidak pernah dirasakannya. Kesempatan yang diberikan oleh Belanda tidak pernah disia-siakan. Timbullah satu golongan masyarakat terdidik di Aceh.

Kaum terdidik inilah yang menjadi calon pemimpin di dalam pergerakan melawan kolonialis Belanda. Secara nasional perjuangan Indonesia pun telah berubah dari perlawanan senjata menjadi perlawanan politik. Salah satu wujud perjuangan politik yang dilakukan oleh para aktivis adalah melalui organisasi pergerakan. Muncullah berbagai pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan dalam rangka melawan Belanda.

Pergerakan politik yang berjalan secara nasional ini menjalar pula ke Aceh. Di Aceh muncul berbagai organisasi kemasyarakatan, baik yang bergerak dalam bidang nonpolitik maupun yang bergerak dalam bidang politik. Di antara organisasi-organisasi itu adalah Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Beberapa pakar menyebut bahwa organisasi ini merupakan organisasi khas masyarakat Aceh.

Pada awal berdirinya PUSA bergerak dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, lama kelamaan organisasi ini beraktivitas pula dalam kancah politik. PUSA ikut mengkonsolidasikan masyarakat untuk berjuang dalam memerdekakan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh PUSA dilaksanakan sejak berdirinya organisasi ini sampai pada tahap mempertahankan kemerdekaan.

Terlepas dari pro dan kontra para sejarawan dan pelaku sejarah sendiri, kehadiran PUSA di Aceh telah memberikan sumbangan besar bagi sejarah sosial politik di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Arief, *Sekitar Peristiwa Penghianatan Tjoemboek*, (Koetaradja: Tanapa Penerbit, 1949)
- C.L. "School en Huwelijk of Atjeh", TBB (1915)
- Erid Morris dan Kahim Audury R. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, (Jakarta : Grafiti, 1990).
- Hasjmy, Ali Ulama Aceh Mujahid dan Pembangun Tamadun Bangsa. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).
- Ibrahim Alfian, T."Pendidikan dalam Proses Pembangunan Bangsa Kasus di Aceh", *Makalah* disampaikan pada Hari Ulang Tahun ke-52 PGRI Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh
- Isa Sulaiman, M. *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997).
- Ismuha, *Lahirnya "Persatuan Ulama Seluruh Aceh" 30 tahun yang lalu*, Buletin Darussalam No. 14 Juni 1969, Banda Aceh.

- Ismuha, "Mengenang Kembali, Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Atjeh, 30 tahun yang lalu", Bagian I, *Darussalam*, No 14 Juni 1969.
- Ismuha, "Mengenang Kembali, Lahirnya Persatuan Ulama Seluruh Atjeh, 30 tahun yang lalu", Bagian II, *Darussalam*, No 15 Juli 1969.
- , *Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI, 1976), hlm. 61
- Jongejans. J. *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu* (Baarn: N.V. Hollandia Drukkerij, 1939).
- mailr.* 504/36: 137
- mailr.* 3225/20.
- Nur El Ibrahimy, M. *Teungku Muhammad Daud Beureueh*, (Jakarta: Gunung Agung, 1986).
- Piekar. A.J. *Atjeh en de Oorlog met Japan*. (Den Haag: W. Van Hoeve, 1949)
- Politieke Politoneel Verslag Betreffende het Gewest Atjeh en Onderhoorigheden*. No. 130x/29.
- Priggodigdo. A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakjat, 1970).
- Pusponegoro, Marwati Djoened, et.al., *Sejarah Nasional VI*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982).
- Reid, A., *The Contest for North Sumatra Atjeh, The Netherlands Britain 1858-1898*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969).

- Reid, A. *The Blood of People*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979).
- Safwan, Mardanas. *Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arief*. (Jakarta: Proyek Biografi Pahlawan Nasional Depdikbud, 1975).
- Said, Muhammad, *Atjeh Sepanjang Abad*. (Medan: Penerbit Pengarang Sendiri, 1961),
- Shabri A. et. Al., *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX* jilid I. (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003).
- Sofyan, Ismail. *Perang Kolonial Belanda di Aceh, The Dutch Colonial War in Aceh*. (Banda Aceh: PDIA, 1990).
- Sufi, Rusdi. *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900-1942)*. (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda, 1997)
- _____. "Organisasi Sosial Politik dan Keagamaan di Aceh pAda Awal Abad Ke XX", *Makalah* yang disampaikan pada kegiatan Diskusi Integrasi yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh di Aula Museum Negeri Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 22 Agustus 2002.

- Sufi, Rusdi. "Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap". *Makalah yang disampaikan pada acara Mengenang Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 23 Januari 2004.*
- Sufi, Rusdi. et. Al., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.* (Jakarta: Proyek IDSN, 1991).
- Sri Waryanti. "Kolonialisme, Pendidikan, dan Muculnya Elit Modern di Aceh Abad 20". *Buletin Haba* No. 12/1999. (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh).
- Tgk.A.K. Yakobi, *Aceh Daerah Modal, Long March ke Medan Area,* (Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001, 1992,
- Van't Veer, Paul. *De Atjeh Oorlog.* (Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspress, 1969).
- Van't Veer, Paul. *Perang Belanda di Aceh,* terj: Aboebakar, (Banda Aceh : PDIA, 1980).
- Van Sluijs, "Nota", *Atjeh en Onderhoorigheden*, September 1918 - Oktober 1920, *Kernpapieren*, 797/156, KIT.
- Zainuddin, H.M. *Bungong Rampo.* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1965).
- Zulfan, "Agama dan Nasionalisme: Suatu Analisis Tentang Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Sebagai Sumber Kekuatan Nasionalisme Indonesia di Aceh". *Makalah*, Konferensi Nasional Sejarah Indonesia VII, Jakarta : 28-31 Oktober 2001.

